

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH SETARA SEMARANG

skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata I
Jurusan Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Disusun Oleh :

DIMAS ARFAN FESDYANDA

D2A606018

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Arfan Fesdyanda

NIM : D2A606018

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara
Semarang**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, Agustus 2012

Pembuat Pernyataan

Dimas Arfan Fesdyanda

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah
Singgah Setara Semarang

Nama Penyusun : Dimas Arfan Fesdyanda

Nomor Induk Mahasiswa : D2A606018

Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik /Strata I

**Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan
Strata I**

Dekan Semarang, Agustus 2012
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Agus Hermani DS, MM

NIP. 19570807.198511.1.001

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Dyah Hariani, MM
NIP. 19580127.198503.2.002

(.....)

2. Rihandoyo, S.Sos, MM, M.Si
NIP. 19710912.199903.1.003

(.....)

Dosen Penguji :

1. Dra. Dyah Hariani, MM
NIP. 19580127.198503.2.002

(.....)

2. Rihandoyo, S.Sos, MM, M.Si
NIP. 19710912.199903.1.003

(.....)

3. Drs. Ari Subowo, MA
NIP. 19610101.199901.1.001

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ "The main purpose of life is to live rightly, think rightly, act rightly" (Mahatma Gandhi)

- ❖ *"Kesuksesan seseorang tidak dinilai dari seberapa besar dan banyak apa yang dia miliki untuk dirinya sendiri, melainkan dari seberapa besar dari apa yang dimiliki yang berarti untuk orang lain."*

- ❖ *"Positive thinking won't let you do anything but it will let you do everything better than negative thinking will."*

- ❖ *"Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future."*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- **Keluargaku tercinta yang selalu mendukung, mensupport dan serta doannya.**
- **Sahabat-sahabatku yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat serta perhatian.**

ABSTRAKSI

**Judul : Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah
Setara Semarang**
NAMA : DIMAS ARFAN FESDYANDA
NIM : D2A606018

Format pembinaan anak jalanan yang tepat sesuai kebutuhan dan harapan dengan memperhatikan yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Diantara faktor dari dalam adalah potensi dan kelemahan yang ada, sedangkan faktor dari luar adalah peluang dan hambatan. Upaya mencari format pengembangan model pada pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah ini akan dilakukan dengan menggali potensi, kelemahan, peluang dan hambatan dari permasalahan anak jalanan yang akan dipadukan dengan pola pendekatan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari anak jalanan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendiskripsikan pencapaian tujuan program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi/pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang sudah dikumpulkan akan disajikan dengan mereduksi data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut : Input, terdiri dari unsur sumber daya pendukung dan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya pendukung yang diperlukan pembinaan anak jalanan di rumah singgah Setara tergolong baik. Proses, Rumah singgah Setara menetapkan program kerjanya dengan menitik beratkan pada pemberdayaan anak-anak jalanan melalui pembelajaran. Outputs (Hasil), intensitas capaiannya belum optimal, namun sejauh kondisi memungkinkan karena terbatasnya sumber dana, sumber daya manusia maupun sarana mobilitas yang dimiliki rumah singgah. Outcomes (Dampak), dilihat dari aspek kinerja menunjukkan belum optimalnya tingkat kemampuan ataupun kapabilitas para petugas rumah singgah dalam memahami prosedur pelayanan maupun pemahaman profesi pekerjaan sosial hingga membawa dampak pada pencapaian kinerja pelayanan.

Kata kunci : Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan

Disetujui oleh Pembimbing I
Tanggal, Agustus 2012

(Dra. Dyah Hariani, MM)
NIP. 19580127.198503.2.002

ABSTRACT

TITLE : *Evaluation of Street Children Development Program at Setara Shelter House Semarang*
NAME : **DIMAS ARFAN FESDYANDA**
NIM : **D2A606018**

Coaching format appropriate to the street children's needs and expectations with respect to the factors of domestic and external factors. Among the factors in the potential and the limitations that exist, while external factors are the opportunities and constraints. Effort to find a format modeled on fostering the development of street children through these houses will be done by exploring the potential, weaknesses, opportunities and constraints of the problems of street children who will be integrated with the existing pattern of approach to suit the needs and demands of the street children themselves. The study aims were to describe the achievement of program development through Shelter Home for street children in Semarang. To determine the factors supporting and inhibiting formation program through a House Shelter for street children in Semarang

The approach used in this study is descriptive qualitative data collection method is observation / observation, documentation, and interviews. The gathered data will be presented by the reduction of unnecessary data in the study. Once that was done inferences / verification.

Based on the discussions and conclusions, the authors propose the following recommendations: Input, consisting of support resources and human resources. Availability of resources necessary coaching support street children in shelter homes Equivalent quite good. Process, the House dropped the equivalent of setting the work program focuses on the empowerment of street children through learning. Outputs (results), the intensity of the achievements have not been optimal, but as far as conditions permit because of the limited financial resources, human resources and mobility facilities owned houses. Outcomes (impact), viewed from the aspect of performance shows non optimal level of capacity or capability of a halfway house officers in understanding service procedures and the understanding of the social work profession to have an impact on the achievement of service performance.

Key words: *Evaluation of Street Children Development Program*

Approved by the Lecturer I
August, 2012

Dra. Dyah Hariani, MM
NIP. 19580127.198503.2.002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang”**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Agus Hermani DS, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah memberikan ijin bagi penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Ketua program studi Administrasi Publik Bapak Drs. AUFARUL MAROM, M.Si
3. Ibu Dra. Dyah Hariani, M.M dan Bapak Rihandoyo, S.Sos, MM, M.Si selaku dosen pembimbing terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini
4. Seluruh Dosen Administrasi Publik Undip terima kasih telah memberikan ilmu kepada saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan strata 1.
5. Keluargaku yang selalu mendukung, mendoakan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Untuk seseorang yang sangat spesial, yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.

Semarang, Agustus 2012

Penulis,

Dimas Arfan Fesdyanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABBSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Kegunaan Penelitian	17
1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis	18
1.5.1. Kebijakan Publik	18
1.5.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan	23

1.5.3. Metode Evaluasi Kebijakan	26
1.5.4. Tipe Evaluasi Kebijakan.....	28
1.5.5. Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik ...	31
1.5.6. Evaluasi.....	37
1.5.7. Anak Jalanan	47
1.5.8. Hak Anak Dalam Konsep HAM	77
1.6. Metode Penelitian.....	82
1.6.1. Perspektif Pendekatan Penelitian	82
1.6.2. Fokus Penelitian	83
1.6.3. Lokasi Penelitian	83
1.6.4. Fenomena Yang Diamati	84
1.6.5. Instrumen Penelitian	85
1.6.6. Pemilihan Informan	86
1.6.7. Metode Pengumpulan Data.....	87
1.6.8. Teknik Analisis Data	90
BAB II	
GAMBARAN UMUM	93
2.1. Sejarah berdirinya Yayasan Setara.....	93
2.2. Visi, Misi dan Kegiatan Yayasan Setara	94
2.3. Susunan Kepengurusan Yayasan Setara.....	95
2.4. Pedoman dasar program kerja.....	97

BAB III	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	99
	3.1. Input.....	100
	3.2. Proses.....	109
	3.3. Hasil.....	128
	3.4. Dampak.....	139
BAB IV	PENUTUP.....	147
	4.1. Simpulan.....	147
	4.2. Saran.....	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Anak Jalanan yang Diberdayakan dari Tahun 2005-2009	11
1.2. Anak Jalanan di Rumah Singgah Semarang	13
1.3. Lima tahap siklus kebijakan dan hubungannya dengan penerapan pemecahan masalah	23
1.4. Tipe Evaluasi Kebijakan.....	30
1.5. Indikator Evaluasi Kebijakan.....	33
1.6. Kriteria Evaluasi	34
1.7. Komponen Analisa Data.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Foto ruangan administrasi Rumah Singgah Setara Semarang	103
3.2. Foto tempat duduk tamu ruang administrasi Rumah Singgah Setara Semarang	103
3.3. Foto Ruang Perpustakaan	104
3.4. Administrasi Pelayanan Perpustakaan	104
3.5. Foto Koleksi Buku Perpustakaan	105
3.6. Foto Ruang Pertemuan dan Belajar	106
3.7. Foto Ruang Dapur	106
3.8. Foto Ruang Kamar Mandi	107
3.9. Foto Ruang Kamar Tidur	107
3.10. Foto Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan	115
3.11. Foto Kegiatan Pembelajaran Anak Jalanan	116
3.12. Foto Suasana Kebersamaan Anak Jalanan	116
3.13. Foto Pembekalan Ketrampilan Anak Jalanan	117
3.14. Foto Pemeriksaan Kesehatan Anak Jalanan	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Tak Berstruktur

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Berstruktur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, teknologi, serta pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak langsung, telah mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Secara material arus pertumbuhan dan perkembangan tersebut seolah-olah berjalan dengan mulus dan menjadi kebanggaan suatu bangsa. Kenyataan sebenarnya telah terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Disatu pihak telah terwujud bangunan-bangunan mewah yang dapat dibanggakan dan menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut, tumbuh perkampungan kumuh yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus. Diperkampungan kumuh hampir 2/3 dari jumlah penduduknya adalah anak-anak, mereka umumnya tergolong anak-anak yang rentan permasalahan sosial, dan perlu mendapat perlindungan khusus untuk menyelamatkannya.

Kondisi ini lebih diperburuk lagi sejak krisis ekonomi dan kepercayaan terjadi pada bulan Juli 1997 yang lalu terasa semakin kompleks, memburuknya situasi perekonomian nasional dan musim kemarau yang berkepanjangan dengan cepat mulai menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, termasuk diwilayah Kota Semarang. Kedua permasalahan ini bukan saja menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran berupa terganggunya produksi distribusi dan konsumsi, tetapi juga melahirkan penurunan daya beli masyarakat dan bahkan daya

tahan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup yang makin melambung, menurut Bagong Suyanto (2002 :1). Lebih lanjut Bagong Suyanto menyatakan, sudah bukan rahasia lagi bahwa selama ini orang dan keluarga miskin umumnya hanya mampu bertahan hidup pas-pasan, bahkan serba kekurangan.

Kondisi seperti ini menyebabkan distribusi kekayaan – kesejahteraan masyarakat menjadi kacau dan tidak merata dilihat dari akses terhadap ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia modal finansial dan teknologi. Terlebih - lebih pada ketersediaan sumber daya manusia, dari dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana telah menyebabkan banyak orang tua mengalami keterpurukan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja, menurunnya daya beli dan harga barang – barang yang melambung, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. Akibat lebih jauh, banyak anak yang mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu ekonomi orangtuanya dengan turun kejalan dan banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan sekolah guna mencari nafkah di jalan. Sehingga jumlah anak jalanan di kota-kota besar menunjukkan peningkatan yang cukup tajam.

Secara Nasional telah terdata oleh Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN, 2000:25), bahwa peningkatan anak jalanan sebelum krisis 15% dan angka itu meningkat hingga 100% dalam masa krisis, selain itu terungkap berbagai perlakuan eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak jalanan diantaranya adalah:

1. Penanganan yang cenderung represif dari Pemda yang lebih demi kepentingan kebersihan kota , seperti GDN, Trantib, penggarukan.

2. Melakukan salah seksual dari orang dewasa terhadap anak, kasus robot gedek, atau sesama anak jalanan.
3. Adanya penculikan anak jalanan untuk dipekerjakan / eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual.

Munculnya kasus-kasus pemerkosaan dan kehamilan tanpa ayah pada anak jalanan perempuan. Lebih buruk lagi adanya penolakan dari sebagian besar masyarakat terhadap kehadiran anak jalanan, dan bahkan hampir tak ada pelayanan yang dapat diakses oleh anak jalanan yang berupa:

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Perlindungan anak
4. Informasi penting untuk mengatasi situasi beresiko

Jadi dapat dikatakan, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Diberbagai komunitas, anak-anak seringkali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidak mampuan orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak. Bagong Suyanto menegaskan, di Indonesia diperkirakan jumlah anak yang putus sekolah mencapai 11,7 juta. Sementara itu sekitar 10,6 juta anak mengalami kecacatan, 70 – 140 ribu anak perempuan terpuruk dan menjadi korban eksploitasi seksual komersial, 400 ribu anak terpaksa menjadi pengungsi karena kerusuhan berdarah yang meletup di berbagai

wilayah, puluhan ribu anak terpaksa hidup dijalanan. Jutaan anak kekurangan gizi dan bahkan ribuan diantaranya tewas karena menderita marasmus dan kwashiorkor. Di Indonesia, jutaan anak terpaksa bekerja di sektor publik yang tak jarang berbahaya dan eksploitatif (*most intolerable forms of child labour*).

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin dan terlebih lagi bagi anak-anak yang terkatagori rawan, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak –anak rawan/anak jalanan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian dan kehidupan anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan. Selanjutnya oleh Sri Sanituti (1999:5), dikelompokkan menjadi empat penyebab pokok menjadi anak jalanan :

1. Kesulitan ekonomi keluarga yang menempatkan seorang anak harus membantu keluarganya mencari uang dengan kegiatan-kegiatan dijalan.
2. Ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga, baik hubungan antara bapak dan ibu, maupun orang tua dengan anak.
3. Suasana lingkungan yang kurang mendukung untuk anak-anak menikmati kehidupan masa kanak-kanaknya termasuk suasana perselingkungan yang kadang-kadang dianggap mereka sangat monoton dan membelenggu hidupnya.

4. Rayuan kenikmatan kebebasan mengatur hidup sendiri dan menikmati kehidupan lainnya yang diharapkan diperoleh sebagai anak jalanan.

Selain faktor ekonomi, juga banyak penyebab yang saling mempengaruhi turunnya anak ke-jalan : meningkatnya “gejala” masalah keluarga seperti : kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda serta kekerasan dalam keluarga sebagai akibat dari memburuknya kondisi ekonomi dan kondisi politik di Indonesia membuat keluarga tidak memiliki lagi keberdayaan dalam melindungi anggota keluarganya. Hal ini diperkuat lagi dengan kebijakan ekonomi macro pemerintah yang kurang mendukung terhadap masyarakat marginal, semakin menyudutkan ketidak berdayaan masyarakat, kasus-kasus pengusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah atau rumah mereka dengan alasan “demi pembangunan”. Akibatnya jika mereka turun ke jalan kekerasanlah yang selalu mereka hadapi, pengeroyokan, perampasan barang, pelecehan seksual dan lain-lain. Jika tidak segera diatasi maka kondisi anak-anak jalanan itu sendiri akan semakin gawat, kemungkinan besar menghadapi kematian dini selalu ada dan sekalipun bisa bertahan hidup maka masa depan mereka teramat suram.

Selain itu sangat mungkin kelak setelah dewasa mereka akan menjadi warga masyarakat yang menyusahkan orang lain atau dapat dikatakan melahirkan generasi yang semakin terpuruk. Dan setiap masalah yang menyentuh kehidupan anak dalam jumlah yang besar akan berdampak tidak menguntungkan bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan dimasa mendatang. Di sisi lain secara runtut sebagai dasar atas upaya pemenuhan hak anak telah dilakukan oleh pemerintah melalui :

1. Pasal 34 UUD 1945
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. UU No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
7. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182
8. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Implementasi Program melalui penanganan permasalahan anak jalanan, upaya pemerintah sejak tahun 1995 hingga bulan maret 2000 Departemen Sosial menjalin kerjasama dengan UNDP melalui proyek INS/94/007 yang kemudian berkembang menjadi proyek INS/97/001 dari proyek ini telah dikembangkan model-model penanganan anak jalanan berupa Rumah Singgah, Mobil Sahabat Anak, dan Pondokan (Boarding House). Proyek ini dilaksanakan ditujuh propinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan (BKS, 2000:9). Kemudian melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPS-BS) sasaran wilayah diperluas menjadi 11 propinsi yang mencakup 12 kota tempat pelaksanaan program (DINSOS Prop. Jawa Tengah, 2003:1). Namun pembinaan yang diterapkan selama ini dari berbagai konsep yang ditawarkan belum dapat berjalan optimal seperti yang diharapkan. Hal ini telah dideteksi sendiri oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (2003:1-2) bahwa ada beberapa hal yang

memerlukan penyempurnaan diantaranya : mekanisme perencanaan program yang masih terpusat, kualitas implementasi pelayanan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggali sumber pengembangan Rumah Singgah dan pengembangan alternatif program pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak jalanan. Perencanaan yang terpusat kurang memberikan jaminan ketepatan pelayanan akan kebutuhan anak jalanan, serta kurang memberikan peluang akan partisipasi masyarakat. Akibatnya, pelayanan hanya bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Hak anak tersebut berlaku secara universal dan telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Konvensi hak-hak anak, yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, perlindungan, pengembangan kemampuan atau pendidikan dan kasih sayang. Namun demikian sosialisasi terhadap regulasi tersebut dimasyarakat belum maksimal, sehingga hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat belum dapat terpenuhi secara optimal. Implikasi langsung dari hilangnya hak-hak anak adalah terjadinya keterlantaran anak. Hal ini dikarenakan adanya kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar penduduk Indonesia sebagai akibat krisis ekonomi dan

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan keluarga baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Banyak keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok. Salah satu upaya keluarga untuk mengatasi hal ini adalah melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mencari nafkah. Kondisi ini mendorong anak-anak memasuki kehidupan jalanan yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab orangtuanya. Belum pulihnya kehidupan bangsa dari krisis, menyebabkan jumlah anak jalanan semakin meningkat populasinya. Tahun 2003 populasi anak jalanan di wilayah Kota Semarang tercatat sejumlah 5.116 anak (8,21%) dari 62.295 anak jalanan yang tersebar di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Merebaknya anak jalanan yang berada hampir di setiap kota-kota besar termasuk halnya di Kota Semarang telah menjadi permasalahan sosial yang serius. Karena disamping jumlah mereka yang terus meningkat, juga ancaman kehidupan yang cukup keras di jalanan terhadap faktor keselamatan dan keamanan. Dari sisi kesehatan, anak jalanan rawan terhadap berbagai penyakit. Kehidupan di jalan dengan tingkat kebisingan dan polusi asap kendaraan, terik matahari, terpaan angin dan guyuran hujan merupakan fenomena kehidupan anak jalanan.

Profesi kegiatan yang digeluti anak jalanan sebagai pengamen, peminta-minta, engelap kaca mobil, penjaja koran dan lain sebagainya lambat laun telah membentuk perilaku tendensius atau mengarah pada perbuatan-perbuatan menyimpang (a-normatif) dan destruktif sehingga mendorong terciptanya kerawanan terhadap tindak pelanggaran dan kejahatan baik di jalan dengan sasaran para pengguna jalan, fasilitas publik maupun dilingungan sosialnya yang lain.

Pemerintah telah berupaya mengambil langkah penanganan anak jalanan diantaranya melalui pendekatan .open house. (rumah terbuka) berupa rumah singgah yang merupakan salah satu wahana pelayanan sosial bagi anak jalanan guna melindungi anak dari situasi kehidupan jalanan yang tidak sehat dan tidak aman. Disamping itu rumah singgah merupakan sarana yang dipersiapkan sebagai pemberi rujukan antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka.

Merebaknya komunitas anak jalanan di Kota Semarang telah mendorong beberapa yayasan/lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskripsikan hasil, manfaat, dan dampak kinerja rumah singgah dalam penanganan anak jalanan serta untuk mengetahui pencapaian sasaran dan manfaat yang ditimbulkannya. Dengan mengetahui kekurangan maupun ketidakberhasilan program, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan atau penyesuaian dimasa yang akan datang.

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : Kep. 178/K/07/2000 tanggal 18 Juli 2000 tentang evaluasi kinerja pembangunan, dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan program mempunyai peranan yang sangat penting, sebab banyak program pembangunan, kurang mengetahui kegagalan dan keberhasilan serta tidak lanjut program. Evaluasi kinerja masih terbatas pada perkembanganpelaksanaan yang dilakukan melalui istem pemantauan, sedangkan evaluasi dilaksanakan setelah program selesai/berfungsi yang dikenal dengan Performance Evaluation belum dilakukan secara sistematis dan melembaga. Evaluasi kinerja adalah bagian dari manajemen pembangunan yang

secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak program yang telah direncanakan dan/atau telah dilaksanakan untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Evaluasi kinerja mencakup hal-hal yang lebih menyeluruh dan lebih menekankan pada umpan balik terhadap masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang diperoleh dari suatu program. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan evaluasi terhadap kinerja suatu organisasi atau unit kerja yakni rumah singgah dalam memberikan pelayanan sosial atau penanganan terhadap anak jalanan. Fokus penelitian mengenai evaluasi kinerja rumah singgah yang terdiri dari evaluasi formal dan evaluasi sumatif

Diketahui adanya upaya pembinaan terhadap anak jalanan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM – LSM dengan pola pembinaan yang bersifat preventif maupun kuratif. Namun terdapat Image negatif yang muncul dikalangan masyarakat terhadap permasalahan pembinaan anak jalanan. Yakni terkesan tidak berhasil alias gagal, tidak serius, tidak terfokus dan hanya menghabiskan uang anggaran negara saja. Selain itu dalam penanganan masalah anak jalanan selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri tidak terjalin jaringan kerja yang baik apalagi kuat antar berbagai pihak. Sehingga pada permasalahan penanganan anak jalanan ini perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian khusus. Upaya ini tidak sekejap, dimana anak jalanan hanya dianggap sebagai obyek yang mudah di “ sapu “ dan mudah dibersihkan dari jalanan, tetapi perlu ditangani secara

tuntas lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan dan tidak hanya terfokus kepada anak jalannya saja tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.

Dalam penanganan masalah anak jalanan diperlukan dukungan dari berbagai sektor baik aparat pemerintah terkait (Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, DISPOL PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dll) LSM, dunia usaha, Pers dan masyarakat. Komitmen yang dibangun bersama lintas sektor ini akan sangat membantu mempercepat proses keberhasilan penanganan masalah anak jalanan.

Dalam Tahun 2005 sampai Tahun 2009 anak jalanan di Kota Semarang terus meningkat karena adanya berbagai macam masalah mulai dari keluarga, perekonomian yang terpuruk, pengaruh tempat tinggal dan lingkungan yang salah. Maka tak heran jika anak jalanan sering menjadi incaran satuan pamong praja yang mana selalu menindak anak jalanan, gelandangan, pengemis. Dalam tahun 2009 melalui dinas sosial kota Semarang ada sekitar 65 anak yang diberdayakan untuk bisa trampil dan juga mandiri. Karena tidak sepatasnya anak yang belum genap untuk dewasa untuk bekerja di jalanan.

Tabel I.1

Anak Jalanan yang Diberdayakan dari Tahun 2005 – 2009

Tahun	Jumlah	%	Diberdayakan	Perbandingan
2005	705		30	4.26%
2006	923	30.9%	38	4.12%
2007	1312	42.1%	50	3.81%
2008	1571	19.7%	62	3.95%
2009	1672	6.4%	65	3.89%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang Tahun, 2010

Berdasarkan tabel diatas diketahui perkembangan anak jalan di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tetapi pemberdayaan yang dilakukan oleh Depsos Kota Semarang tidak sebanding dengan jumlah anak jalanan di Kota Semarang, hal ini mengindikasikan permasalahan anak jalanan ini tidak henti-hentinya disoroti sebagai permasalahan yang tak ada ujung pangkalnya bagaikan lingkaran setan yang tak habis-habis. Ada apa dan kenapa - apakah model pembinaan yang selama ini diterapkan tidak sesuai atau karena hal lain? Faktor inilah yang membuat peneliti tertarik dan ingin turut memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengentasan anak jalanan yang terfokus pada masalah deskriptif model pembinaan anak jalanan yang diterapkan selama ini, serta upaya mencari solusi pengembangan model pembinaan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan anak jalanan. Titik persoalan ini diperlukan adanya penelitian terhadap model pembinaan yang sudah diterapkan, terutama pada model pembinaan melalui Rumah Singgah sebagai dasar penanganan pemecahan masalah yang terjadi. Selanjutnya dapat diharapkan ditemukan pengembangan model pembinaan Rumah Singgah yang tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan anak jalanan terutama didaerah Kota Semarang. Selama ini upaya telah dilakukan oleh pihak rumah singgah di Kota Semarang melalui penyelenggaraan berbagai kursus atau pelatihan bagi anak jalanan yaitu :

Tabel I.2**Anak Jalanan di Rumah Singgah Semarang**

Nama Rumah Singgah	Jumlah anak	Penanganan			
		Kembali ke orang tua	Kembali ke Sekolah	Bekerja	Dirujuk ke Panti
Putra Mandiri	781	650	100	26	5
Anak Bangsa	1051	590	350	100	10
Gratama	910	410	319	136	45
Setara	975	475	360	116	25

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di empat rumah singgah di Semarang dapat dikemukakan bahwa kehidupan nyata sehari-hari dalam sebuah rumah singgah digambarkan ibarat sebuah keluarga dimana para pekerja sosial didalamnya bertindak sebagai orang tua atau kakak bagi apra anak jalanan yang menjadi binaannya. Dalam sebuah keluarga, hubungan yang terjadi bersifat informal dimana satu dengan lainnya bersikap saling mengasihi dan memperhatikan. Dilain pihak sebagai orang tua, pekerja sosial membimbing anak-anak jalanan kearah perilaku sehari-hari yang sesuai dengan norma. Adapun bimbingan terhadap anak-anak jalanan berlangsung setiap saat tanpa adanya jadwal yang tetap. Penciptaan suasana kekeluargaan bertujuan agar anak jalanan dapat kembali menemukan konsep keluarga dimana untuk sebagian besar diantaranya tidak lagi dapat dipenuhi. Dengan keadaan ini, maka konsentrasi terbesar pekerjaan pekerja sosial adalah memperhatikan dan berhubungan dengan anak jalanan.

Rumah singgah akan menjadi saringan (filter) bagi anak untuk menampilkan perilaku yang normatif. Melalui gambaran sehari-hari fenomena di rumah singgah

selanjutnya rumah singgah bagi kelompok anak jalanan memiliki fungsi-fungsi, antara lain merupakan:

a. Tempat Pertemuan (Meeting Point)

Rumah singgah merupakan tempat bertemunya antara pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan dan melakukan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan rumah singgah.

b. Pusat Assesment dan Rujukan

Menjadi tempat untuk melakukan assesment atau diagnosis terhadap berbagai kebutuhan dan masalah anak jalanan serta melakukan rujukan (referral) pelayanan sosial bagi anak jalanan yang menjadi binaannya.

c. Fungsi Fasilitator

Rumah singgah merupakan media perantara atau fasilitator antara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti maupun lembaga-lembaga lainnya. Anak jalanan diharapkan tidak terus-menerus bergantung kepada Rumah Singgah, melainkan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui atau setelah proses pelayanan Rumah Singgah.

d. Fungsi Perlindungan

Rumah Singgah dipandang sebagai tempat berlindung dari tindak kekerasan maupun tindakan eksploitasi lainnya terhadap anak dijalanan.

e. Pusat Informasi

Rumah Singgah menyediakan informasi berbagai hal yang berkaitan dengan

kepentingan anak jalanan, seperti : data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, bantuan sosial, kursus ketrampilan dan lain sebagainya.

f. Kuratif-Rehabilitatif

Dalam fungsi ini Rumah Singgah mampu mengatasi permasalahan sosial anak jalanan melalui upaya merubah sikap dan perilaku anak yang pada akhirnya akan mampu mengembalikan serta menanamkan fungsi sosial anak. Intervensi profesional dilakukan termasuk menggunakan tenaga konselor yang sesuai dengan masalah yang dialami anak.

g. Akses terhadap Pelayanan

Sebagai tempat persinggahan, rumah singgah menyediakan akses terhadap berbagai pelayanan sosial bagi anak jalanan. Untuk itu peran petugas dan para pekerja sosial di rumah singgah akan membantu anak untuk mencapai pelayanan tersebut.

h. Re-Sosialisasi

Sebagai upaya untuk mengenalkan kembali norma, situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan, oleh karenanya lokasi rumah singgah berada ditengah lingkungan masyarakat.

Dalam mencari format pembinaan anak jalanan yang tepat sesuai kebutuhan dan harapan ada hal-hal tertentu yang menjadi faktor utama yang patut diperhatikan yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Diantara faktor dari dalam adalah potensi dan kelemahan yang ada, sedangkan faktor dari luar adalah peluang dan hambatan. Baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar terdapat hal-hal tertentu yang patut

diperhatikan yang menjadi kunci dalam mencari format pembinaan yang tepat bagi anak jalanan. Upaya mencari format pengembangan model pada pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah ini akan dilakukan dengan menggali potensi, kelemahan, peluang dan hambatan dari permasalahan anak jalanan yang akan dipadukan dengan pola pendekatan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari anak jalanan itu sendiri.

1.2. Perumusan Masalah

Karena permasalahan anak jalanan yang sangat kompleks sehingga menuntut penanganan yang cermat, serius, terfokus dan kontinue maka diperlukan pengembangan model pembinaan anak jalanan yang tepat sasaran, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian tujuan program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang ?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan pencapaian tujuan program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa keperluan diantaranya :

1. Kegunaan Teoritik.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat kebenaran teori tentang model pembinaan yang tepat bagi anak jalanan melalui rumah singgah di Kota Semarang.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan model pembinaan terhadap anak jalanan melalui Rumah Singgah, sebagai model pembinaan yang diterapkan selama ini. Dapat memberikan solusi dalam mencari pengembangan model pembinaan anak jalanan melalui Rumah Singgah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan anak jalanan. Dengan demikian hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk masukan kepada Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial kota atau kabupaten di Jawa Tengah maupun LSM-LSM yang menangani pembinaan anak jalanan, yang lebih penting lagi adalah bahwa penelitian ini dapat berfungsi bagi sasaran atau anak jalanan itu sendiri dalam

upaya menuju masa depan yang lebih baik dengan penuh percaya diri serta memiliki kemandirian yang utuh sebagai generasi penerus bangsa

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Kebijakan Publik

1.5.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :

“ ...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah

“a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara.

Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu

“...*is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program ...*” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...).

Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19). Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

1. penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
2. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
3. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
4. implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)
5. Penilaian Kebijakan (*Policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) adalah sebagai berikut

1. *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi,
2. keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan,

3. tahap implementasi kebijakan,
4. evaluasi program dan analisa dampak,
5. *feedback* yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

1.5.1.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Brewer dalam *Studying Public Policy*, proses kebijakan terdiri atas 6 tahap:

1. permulaan /penanaman (invensi),
2. estimasi (perkiraan),
3. seleksi (pemilihan),
4. implementasi (penerapan),
5. evaluasi (penilaian),
6. terminasi (penyelesaian).

Dalam pandangan Brewer, invensi atau permulaan mengacu pada tahap paling awal dalam rangkain tersebut ketika masalah akan dirumuskan. Dia

menjelaskan bahwa tahap ini dapat digolongkan sebagai tahap perumusan masalah dan pencarian solusi. Tahap kedua adalah perkiraan yang menghitung dan memperkirakan tentang resiko, biaya, dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai solusi yang akan diterapkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini akan melibatkan evaluasi teknis dan pilihan normatif. Tujuan tahap ini adalah untuk mempersempit pilihan-pilihan yang masuk akal dengan tidak memasukkan pilihan-pilihan yang tidak memungkinkan dan menggunakan pilihan-pilihan yang mungkin saja dapat diterapkan. Tahap ketiga terdiri atas pengambilan satu atau kombinasi solusi yang diterapkan hingga akhir tahap ini. ketiga tahap selanjutnya adalah tahap yang memberikan pilihan-pilihan, mengevaluasi hasil dan seluruh proses dan pemberhentian kebijakan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicapai dari evaluasi tersebut.

Menurut Ramesh dalam *Studying Public Policy* ada lima tahap siklus kebijakan, yaitu :

- a. penyusunan agenda,
- b. perumusan kebijakan,
- c. pembuatan keputusan,
- d. penerapan kebijakan,
- e. evaluasi kebijakan

Tabel I.3
Lima tahap siklus kebijakan dan hubungannya dengan
penerapan pemecahan masalah

Fase penerapan pemecahan masalah	Tahap-tahap siklus kebijakan
pengenalan masalah perumusan solusi pilihan solusi penerapan solusi menjadi pengaruh pengawasan hasil	penyusunan agenda perumusan kebijakan pembuatan keputusan penerapan kebijakan evaluasi kebijakan

Sumber : (Ramesh, 1990:12)

1.5.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002:132) menyatakan Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

1. untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya?,
2. untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan;
3. untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi

yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Samodra dkk (1994:15) menyatakan bahwa kebijakan public selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan kinerja atau kinerja kebijakan diukur.

Menurut Sofian Efendi, tujuan dari evaluasi kebijakan public adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana kinerja kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variable independen tertentu
2. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan variasi itu? Jawabannya berkaitan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.
3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variabel – variabel yang

bersifat natural atau variabel lain yang tidak dapat dan dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. (Hanafi & Guntur, 1984: 16). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan,
2. Proses implementasi kebijakan,
3. Konsekuensi kebijakan,
4. Efektivitas dampak kebijakan (Wibowo, 1994: 9).

Sementara itu Pall (1987: 52) membagi evaluasi kebijakan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. *Planning and need evaluations,*
2. *Process evaluations,*
3. *Impact evaluations,*
4. *Efficiency evaluations.*

Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35), evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses
2. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan
3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.

1.5.3. Metode Evaluasi Kebijakan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar dalam Samodra (1994:16-17) menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah. Yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan sebuah hipotesis.
2. Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
4. Mengembangkan solusi-solusi alternatif.

5. Memperkirakan/mempertimbangkan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. Memantau secara terus-menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya.

Menurut Dunn (2000:601) menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Sundarso, dkk.2006:22).

Selanjutnya Ripley (Wibawa,op.cit:8-9) mengatakan bahwa kegiatan evaluasi kebijakan merupakan langkah awal untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi adalah :

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan.
2. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur.
3. Apakah program didesain secara logis.
4. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan.

5. Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut.
6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisien dan ekonomi. Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat.
7. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program.
8. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non sasaran.
9. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, terhadap masyarakat.
10. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat.
11. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

1.5.4. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut William N Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Evaluasi sebelum dilaksanakan (evaluasi summative),
2. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
3. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan}.

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi sumatif kebijakan. Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah kebijakan. Menurut Finance (1994:4)

ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) dan evaluasi meta (*meta-evaluations*).

Evaluasi kecocokan (*appropriateness*) menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ? juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta ? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan. Evaluasi efektivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan ? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

Evaluasi efisiensi, merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya ? Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan ? Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional ? apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi

sosial, kultural dan lingkungan ? apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

Secara substansial, keempat tipe evaluasi ini, dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel I.4
Tipe Evaluasi Kebijakan

No	Tipe Evaluasi	Pengujian Dasar
1	Evaluasi Kecocokan	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan? b. Apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? c. Siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut : pemerintah atau sector swasta ?
2	Evaluasi Efektifitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan ? b. Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud? c. Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ?
3	Evaluasi Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output kebijakannya ? b. Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut ?
4	Evaluasi Meta	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah professional ? b. Apakah Evaluasi tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ? c. Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:136-138)

Sedangkan menurut James Anderson (1969:151-152) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai

kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut : apakah program dilaksanakan dengan semestinya ? berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti ?. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik.

Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

1.5.5. Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Bridgman & Davis (2000:130) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

- (1) indikator input,
- (2) indikator process,
- (3) indikator outputs dan
- (4) indikator outcomes.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Menurut Crossfield & Byrner (1994:4) evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian kinerja dari sebuah program atau kebijakan dengan pertanyaan dasar :

- (1) apakah input yang digunakan telah memaksimalkan outputnya ?
- (2) apakah dampak yang diinginkan telah tercapai sebagaimana tujuan tertulisnya ?
- (3) apakah kebijakan tersebut selaras dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan rakyatnya ?

Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri & Yuwono (2002:140-141) menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

Tabel I.5
Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Input	<ul style="list-style-type: none"> a. apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ? b. berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2	Process	<ul style="list-style-type: none"> a. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ? b. bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode / cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?
3	Outputs	<ul style="list-style-type: none"> a. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ? b. berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut ?
4	Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan ? b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan ? c. adakah dampak negatifnya ? seberapa seriuskah ?

Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:140-141)

Kriteria evaluasi oleh William Dunn dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.6
Kriteria Evaluasi

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : William N Dunn (1999:610)

Selanjutnya, Howlett dan Ramesh (1995:170) menyatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu :

At general level, policy evaluations can be classified in three broad categories administrative evaluation, judicial evaluation, dan political evaluation which differ in the way they are conducted, the actor they involve, and their effects.

Evaluasi administratif memerlukan kumpulan informasi yang tepat untuk penyampaian program dan himpunannya dengan cara dibakukan dengan mengadakan perbandingan biaya dan hasil dari waktu ke waktu dan melewati sektor kebijakan. Evaluasi yudisial menyangkut persoalan hukum, dimana berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program pemerintah dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan oleh pengadilan. Sedangkan evaluasi politik berusaha untuk mengatasnamakan suatu kebijakan yang berhasil atau gagal yang diikuti oleh permintaan untuk dilanjutkan atau perubahan. Selain berusaha memberikan penjelasan tentang berbagai fenomena

kebijakan, evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan tentang tindakan apa yang perlu diambil terhadap kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Disamping itu harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikejanya untuk memperoleh data yang valid. Selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi. Sejumlah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan, namun hampir semua teknik yang ada dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode evaluasi lainnya.

Berbagai macam teknik dapat digunakan dengan lebih dari satu metode analisis kebijakan, ini menunjukkan sifat saling ketergantungan dari perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi di dalam analisis kebijakan. Adanya reaksi dari masyarakat tentu saja merupakan salah satu kegagalan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab dari kegagalan dan proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan.

Dari beberapa pendapat para pakar di atas, maka dapat diartikan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Kebijakan mengalami pro dan kontra hal ini apakah karena proses pembuatan dari kebijakan sudah cukup rinci,

terbuka dan memenuhi prosedur serta apakah peraturan tersebut telah didesain secara logis untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berbagai macam keputusan dapat diambil atas dasar evaluasi yang dilakukan beberapa diantaranya yaitu

- (1) meneruskan dan mengakhiri program,
- (2) memperbaiki praktek dan prosedur administrasi,
- (3) menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi,
- (4) melembagakan program ke tempat lain,
- (5) mengalokasikan sumber daya ke program lain dan
- (6) menerima dan menolak pendekatan/teori yang dipakai (Wibawa, op.cit:12).

Dari kelima keputusan yang diambil atas dasar evaluasi dilihat dari jenis kebijakan yang dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi kebijakan publik setidaknya tidaknya mengandung tiga komponen dasar, yakni tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci maka dari itu birokrat harus menterjemahkan sebagai program aksi. Penetapan suatu kebijakan dalam pelaksanaan program bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu evaluasi harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan. Dengan adanya evaluasi diharapkan akan ditemukan beberapa hal yang membuat tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan.

1.5.6. Evaluasi

1.5.6.1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan (Suharsimi, 2007:1).

Suchman (dalam Anderson 1975) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari Worthen dan Sanders (dalam Anderson, 1971) evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Fernandes, 1984) mendefinisikan evaluasi sebagai

proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

Anderson (dalam Arikunto, 2004 : 1) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004:1), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan ;

Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS Depdiknas (2002 : 2) memberikan pengetahuan Evaluasi program adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan.

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Ralp Tyler,1950 (dalam Suharsimi, 2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program

adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Suharsmi Arikunto dan Abdul Jabar (2004 : 14) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila "program" ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.

2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

1.5.6.2.Karakteristik Evaluasi

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (Suharso, 2005: 136). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989:238). Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

1. Fokus Nilai.

Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi Fakta – Nilai.

Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakantindakan

yang telah dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (ex-ante).

4. Dualitas Nilai.

Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain). (LAN, 2004:237-238)

Suharsimi Arikunto dalam Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan mengemukakan evaluasi program sebagai “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program” selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan. (Arikunto, 2005:10-11)

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkungannya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam Modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Arikunto menyebutnya dengan tes formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah terbentuk

seperti: ulangan harian (Arikunto, 2005:36). Sedang tes sumatif setelah pemberian sekelompok program atau program yang lebih besar, seperti: ulangan umum (Arikunto, 2005:39). Scriven dalam Purwanto dkk evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu evaluasi memberikan data yang relatif cepat (shot term data). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari akhir program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan (Purwanto dkk, 1999:21).

Menurut Sondang Siagian istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu: “Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakikat dari penilaian itu adalah:

1. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.

2. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? “Korektifitas” yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan -penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan itu terjadi. Jika ini telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat “performance” yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar, atau peling sedikit, inefisiensi yang semakin berkurang.
3. Penilaian bersifat “prescriptive”. Sesuatu yang bersifat “prescriptive” adalah yang bersifat “mengobati”. Setelah melalui diketemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan “resep” untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul kembali, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya “penyakit” yang baru.
4. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang “berdiri

sendiri” dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Malahan sesungguhnya kelima fungsi organic administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain. (Siagian, 1970:143-144)

Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membanding antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

1.5.6.3. Tujuan Evaluasi

Terdapat enam hal tujuan evaluasi yang disampaikan Sudjana (2006:48), yaitu untuk :

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
3. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar (2004:13) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hak tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. (Kosasih, 2004:3)

William N. Dunn menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan :

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public,
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target,
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.(William N Dunn, 2003:609)

1.5.7. Anak Jalanan

1.5.7.1. Pengertian dan Karakteristik Anak Jalanan

Anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalagunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong Anak jalanan menjadi obyek seksual seperti sodomi atau pelacuran anak.

Sementara itu menurut Soedijar (1989) dalam studinya menyatakan bahwa anak jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya.

Sedangkan Putranto dalam Agustin (2002) dalam studi kualitatifnya mendefinisikan anak jalanan sebagai anak berusia 6 sampai 15 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang tua mereka, dan bekerja seharian untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum. Selain itu Sugeng Rahayu mendefinisikan anak jalanan adalah anak-anak yang

berusia di bawah 21 tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah yang dengan berbagai cara (tidak termasuk pengemis, gelandangan, bekerja di toko/kios).

Dalam buku “Intervensi Psikososial” (Depsos, 2001:20), anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan empat faktor penting yang saling terkait yaitu :

1. Anak – anak
2. Menghabiskan sebagian waktunya
3. Mencari nafkah atau berkeliaran
4. Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan di bedakan dalam tiga kelompok (Surbakti dkk. eds : 1997) :

1. Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak – di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
2. Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekwensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu

sebab – biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual (Irwanto, 1995).

3. Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya (Blanc & Associates, 1990;Irwanto dkk,1995; Taylor & Veale, 1996). Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi – bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai – walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2000:2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori :

1. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria :
 - a. Putus hubungan atau lama tidak ketemu dengan orang tuanya
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang / tidur;
 - c. Tidak lagi sekolah;
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria :
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-16 jam berada di jalanan
 - c. mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudara, umumnya di daerah kumuh;
 - d. Tidak lagi sekolah;
 - e. Pekerjaan : penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll;
 - f. Rata-rata berusia dibawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria :
 - a. Bertemu teratur setiap hari / tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. 4-5 jam kerja di jalanan;
 - c. Masih bersekolah;
 - d. Pekerjaan : Penjual koran, penyemir, pengamen, dll;
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.
 - f. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria :
 - g. Tidak lagi berhubungan / berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - h. 8-24 jam berada di jalanan;
 - i. Tidur di jalan atau rumah orang tua;
 - j. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi;
 - k. Pekerjaan : calo, mencuci bis, menyemir, dll.

Dalam buku “Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan melalui Rumah Singgah” (2002:13-15), Setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan di masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut :

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan cirinya sebagai berikut :
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu
 - b. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang
 - c. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun, dll
 - d. Tidak bersekolah lagi
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah :
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan
 - b. Berada di jalanan sekitar 8 s.d. 12 untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam
 - c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua / saudaranya, atau di tempat kerjanya di jalan
 - d. Tidak bersekolah lagi
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah :
 - a. Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur)
 - b. Berada di jalanan sekitar 4 s.d. 6 jam untuk bekerja

- c. Tinggal dan tidur bersama orang tua/wali
- d. Masih bersekolah

Lebih jelas dalam buku “Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah” (BKSN, 2000:61-62) kategori dan karakteristik anak jalanan :

1. Kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalanan karakteristiknya :
 - a. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan
 - b. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan
 - c. Tidur diruang-ruang / cekungan diperkotaan, seperti : terminal, emper toko, kolong jembatan dan pertokoan
 - d. Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus
 - e. Putus sekolah
 - f. Bekerja sebagai : pemulung, ngamen, mengemis, semir, kuli angkut barang
 - g. Berpindah-pindah tempat
2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang kerumah orang tua mereka setiap hari Karakteristiknya :
 - a. Hubungan dengan orang tua masih ada tetapi tidak harmonis
 - b. Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah
 - c. Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali kerumah
 - d. Bekerja sebagai : pengemis, pengamen diperempatan, kernet, asongan koran dan ojek payung

3. Kelompok anak jalanan yang bekerja dijalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali Karakteristiknya :
 - a. Bekerja dijalanan sebagai : pedagangan asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang.
 - b. Hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum/tempat ibadat seperti masjid
 - c. Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali
 - d. Ikut membiayai keluarga didesanya
 - e. Putus sekolah
4. Anak remaja jalanan bermasalah (ABG) karakteristiknya :
 - a. Menghabiskan sebagian waktunya dijalanan
 - b. Sebagian sudah putus sekolah
 - c. Terlibat masalah narkoba dan obat-obatan lainnya
 - d. Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas, pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi
 - e. Berasal dari keluarga yang tidak harmonis

Lebih lanjut dijelaskan dalam buku tersebut, indikator anak jalanan :

1. Usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun
2. Intensitas hubungan dengan keluarga :
 - a. Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari
 - b. Frekwensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang

- c. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga
3. Waktu yang dihabiskan dijalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
4. Tempat tinggal :
 - a. Tinggal bersama orang tua
 - b. Tinggal berkelompok dengan teman-temannya
 - c. Tidak mempunyai tempat tinggal.
5. Tempat anak jalanan sering dijumpai di : Pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokalisasi WTS, perempatan jalan atau jalan raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umum (pengamen), tempat pembuangan sampah.
6. Aktifitas anak jalanan : menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran / majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.
7. Sumber dana dalam melakukan kegiatan : modal sendiri, modal kelompok, modal majikan / patron, stimulan / bantuan.
8. Permasalahan : korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, ditangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan kriminal, ditolak masyarakat lingkungannya.
9. Kebutuhan anak jalanan : aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan, bimbingan ketrampilan, gizi dan kesehatan, hubungan harmonis dengan orangtua keluarga dan masyarakat.

1.5.7.2. Faktor-Faktor Penyebab Timbul dan Tumbuhnya Gejala Anak Jalanan

Sementara ini banyak orang mengira bahwa faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalanan untuk bekerja dan hidup dijalan adalah karena faktor kemiskinan. Namun data dari literatur yang ada menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab anak turun ke jalan. Berikut ini adalah secara umum ada tiga tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan (Depsos, 2001:25-26) :

1. Tingkat mikro (*immediate causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya
2. Tingkat meso (*underlying causes*), yaitu faktor yang ada dimasyarakat
3. Tingkat makro (*basic causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan truktur makro.

Pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga bisa berdiri sendiri, yakni :

1. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
2. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orangtua, salah perawatan atau kekerasan dirumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga / tetangga, terpisah dengan orangtua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial.

Pada tingkat meso (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat drop out dari sekolah.
2. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu.
3. Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon kriminal.

Pada tingkat makro (struktur masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama dijalanan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi.
2. Pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.
3. Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan antara sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai trouble maker atau pembuat masalah (security approach/pendekatan keamanan).

Atau dengan kata lain faktor-faktor yang membuat keluarga dan anaknya terpisah (BKSNI,2000:111) adalah :

1. Faktor pendorong :
 - a. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga, sehingga tidak mampu memenuhi

kebutuhan keluarga, maka anak-anak disuruh ataupun dengan sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut.

- b. Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betah tinggal dirumah /anak lari dari keluarga.
- c. Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak lari dari rumah.
- d. Kesulitan hidup dikampung, anak melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa.

2. Faktor Penarik :

- a. Kehidupan jalanan yang menjanjikan, dimana anak mudah mendapatkan uang, anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas.
- b. Diajak teman.
- c. Adanya peluang disektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian.
- d. Disamping faktor-faktor tersebut diatas lingkungan komunitas juga sebagai penyebab bagi gejala anak dijalan terutama yang erat kaitannya dengan fungsi stabilitas sosial dari komunitas itu sendiri. Ada dua fungsi utama stabilitas komunitas, yaitu pemeliharaan tata nilai dan pendistribusian kesejahteraan dalam kalangan komunitas yang bersangkutan. Dalam pemeliharaan tata nilai misalnya tetangga atau tokoh masyarakat tidak menasehati menegur, ataupun melarang anak berkeliaran dijalan. Dan berkenaan dengan pendistribusian kurangnya bantuan dari tetangga atau

organisasi sosial kemasyarakatan terhadap keluarga miskin dilingkungannya. Dengan kata lain belum memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar dilingkungan komunitasnya.

Lebih jauh lagi disebutkan, ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi anak turun kejalan :

1. Meningkatnya “gejala” masalah keluarga, seperti :
 - a. Kemiskinan
 - b. Pengangguran
 - c. Perceraian
 - d. Kawin Muda
 - e. Kekerasan dalam keluarga, dll
2. Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka dengan alasan “demi pembangunan”, mereka semakin tidak berdaya dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan segelintir orang.
3. Migrasi desa kekota dalam mencari kerja, yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa-kota, kemudahan transportasi dan ajakan kerabat, membuat banyak keluarga dari desa pindah kekota dan sebagian dari mereka terlantar, hal ini mengakibatkan anak-anak mereka terlempar ke jalanan.
4. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.

5. Adanya kesenjangan sistem Jaring Pengaman Sosial sehingga Jaring Pengaman Sosial tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan.
6. Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak (lapangan, taman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa pada daerah-daerah kumuh perkotaan, dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai ajang bermain dan bekerja.
7. Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk menjadi pencari kerja dan jalanan mereka jadikan salah satu tempat untuk mendapatkan uang.
8. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak telah menyebabkan anak mencari kebebasan.

Dari uraian diatas, beberapa faktor yang saling tarik menarik munculnya gejala anak jalanan dan semakin berkembang yang secara kuantitatif jumlah anak jalanan semakin sulit diprediksi.

1.5.7.3. Proses Terjadinya Anak Jalanan

Oleh Tjuk Kasturi Sukiadi (1999:10) diungkapkan, bahwa proses terjadinya anak jalanan dibagi dalam beberapa pentahapan :

Tahap I : Pengetahuan Sampai Adanya Ketertarikan

Ada kebiasaan semakin berkelompok dari anak-anak di perkampungan.

Mereka ini biasanya bersama kelompoknyajalan-jalan ketempat

sebagaimana telah disepakati bersama. Diperjalanan mereka menjumpai anak-anak jalanan sedang bekerja. Sampai disini masih sebatas melihat dan sebagai pengetahuan mereka, bahwa ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan itu bisa dilakukan anak seusia mereka. Pada tahap ini masih tergantung pada masing-masing anak, seberapa besar perhatian dan ketertarikan pada pekerjaan tersebut. Namun dalam tahap ini tidak membuat anak langsung turun ke jalan, melainkan bergantung pada stimulus berikutnya (ada fasilitas)

Tahap II : Ketertarikan Sampai Keinginan

Dalam tahap ini merupakan tahap ketertarikan yang telah mendapat “fasilitas” atau faktor pendorong, seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan hubungan orang tua. Fasilitas tersebut, akan semakin memperkuat keinginan anak untuk turun ke jalan.

Tahap III : Pelaksanaan

Si anak mulai melaksanakan niatan dengan mendatangi tempat operasi. Bila disini mereka menemukan teman yang sudah dikenal maka keinginan segera terealisasi meski agak malu-malu.

Tahap IV: Mulai memasuki kehidupan Anak Jalanan

Dalam tahap ini si anak akan diterpa berbagai pengaruh kehidupan jalanan. Namun demikian hal ini juga tergantung pada diri anak itu sendiri dan teman yang membawanya. Yang tak kalah penting peranan orang tua untuk tetap mengontrolnya. Bila ketiga pihak diatas masih berada dijalanan, anak

akan tetap positif dan tak tercerabut dari norma dan nilai yang telah dipegang sebelumnya.

Tahap V : Terjerumusny atau Kembali Pada Kehidupan Wajar

Bila dalam perkembangannya si anak merasa bahwa mencari nafkah dijalanan semakin sulit, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bertahan dengan tetap memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas jalanan. Kemungkinan kedua, bila menerima stimulus baik dari kawan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, maka si anak sudah masuk dalam kategori anak jalanan bebas dimana norma agama dan kemasyarakatan cenderung ditinggalkan. Pada tahap inilah kecenderungan berperilaku menyimpang terjadi seperti, judi seks bebas, atau tindakan kriminal lainnya.

1.5.7.4. Konsep dan Pendekatan Upaya Penanganan Anak Jalanan

Anak jalanan adalah salah satu diantara sekian banyak kelompok anak yang memerlukan perlindungan, karena kehidupan mereka ini rentan dari eksploitasi dan kekerasan. Sejauh ini telah banyak dilakukan upaya-upaya secara sistematis untuk menangani permasalahan anak jalanan, baik oleh pemerintah maupun dari masyarakat (LSM). Ada beberapa upaya pendekatan untuk menangani anak jalanan, diantara adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan TRI BINA

Pendekatan Tri Bina merupakan suatu bentuk metode penanganan permasalahan

kesejahteraan sosial dengan memadukan secara serasi upaya untuk menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan manusia yang menjadi sasaran dengan upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui peningkatan penghasilan dari usaha yang layak serta upaya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya. Pendekatan Tri Bina mencakup tiga hal:

a. Bina Manusia

Sasaran bina manusia adalah individu, keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat yang saling berinteraksi secara dinamis dalam berbagai bentuk proses pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan tugas kehidupan. Dengan kata lain sasaran bina manusia mencakup bina personal (personal development) di satu pihak dan bina sosial (sosial development) di pihak yang lain. Bina manusia dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial memiliki makna yang sangat penting dalam rangka pengembangan potensi hereditas individu menjadi kemampuan aktual (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dan membantu memecahkan problematika kesejahteraan sosial serta membantu manusia memulihkan dan meningkatkan peranan sosialnya sesuai dengan martabat dan harga diri manusia.

b. Bina Usaha

Sasaran bina usaha ini sama dengan sasaran bina manusia, yakni individu, keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat. Dalam bina usaha terdapat upaya-upaya untuk membantu penyediaan dan pengembangan lapangan usaha atau kerja yang layak, baik secara teknis maupun manajerial,

memberikan dukungan berupa bantuan modal dan peralatan usaha, bimbingan teknis-manajerial. Penyediaan bahan baku, pemerosesan produksi dan pemasaran, hingga upaya pengembangan hasil usaha untuk keperluan investasi. Semuanya itu dalam rangka untuk peningkatan taraf kesejahteraan soial.

c. Bina Lingkungan

Lingkungan merupakan hal penting yang mampu mempengaruhi bina manusia maupun bina usaha. Lingkungan bisa dikatakan positif apabila mampu mendukung peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan. Sebaliknya, lingkungan dikatakan negatif apabila lingkungan menjadi penghambat atau bahkan merusak kehidupan dan penghidupan. Lingkungan terbagi menjadi dua, (1) lingkungan sosial, dan (2) lingkungan fisik dan lingkungan hidup. Lingkungan sosial memegang peranan penting dalam menentukan status dan peran sosial, mengurangi keterisolasian sosial dan stres psiko-sosial. Serta memaksimalkan pengembangan potensi fisik, intelektual, mental, spiritual, moral dan sosial. Sedangkan lingkungan hidup menyediakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar, mengembangkan kemampuan berusaha dan berkreasi.

Dalam pendekatan Tri Bina ada tiga proses bantuan yang dilakukan secara bertahap:

- a. Bantuan pemberdayaan, berupa: Bantuan pendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, Bantuan pemanfaatan lahan dan atau sarana produksi,

Tenaga penyuluh dan pendamping, Bantuan berupa fasilitatif, informatif, dan konsultatif

- b. Bantuan pengembangan, yang meliputi: Tenaga penyuluh dan pembimbing, Bantuan-bantuan pendukung lain, termasuk peralatan, Bantuan pemandirian dan pembinaan lanjut, berupa bantuan untuk penyusunan rencana pemandirian dan tindak lanjut, terutama melalui kemitraan. Peningkatan intensitas peran aktif pemerintah daerah setempat, lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) terkait, dunia usaha dalam pengembangan dan pemantapan hasil-hasil pengembangan yang telah dicapai (BКСN,2000:125).

2. Pendekatan Komprehensif-Integratif

Pendekatan ini secara khusus dilakukan untuk menangani permasalahan anak jalan, walau tidak menutup kemungkinan bisa juga untuk menangani problematika sosial lainnya. Pendekatan komprehensif ini dilakukan dengan membentuk pos-pos atau basis yang diperuntukkan sebagai pusat pelayanan. Ada beberapa basis dalam pendekatan ini:

a. Basis jalan (*street-based*)

Basis ini adalah tahap pertama yang tujuannya untuk memberikan peningkatan pemahaman anak yang masih berada di jalanan untuk merespon berbagai situasi yang membahayakan dirinya.

b. Basis rumah singgah (*center-based*)

Basis ini diarahkan pada peningkatan kemampuan pekerja sosial rumah singgah untuk menjangkau anak di jalan, mengadakan pengkajian kondisi

kehidupan anak, mengadakan rujukan dengan organisasi atau lembaga pelayanan terkait serta ,menciptakan relasi dengan orang tua anak.

c. Basis panti (*Shelter*)

Basis ini diarahkan pada keberlanjutan proses pelayanan melalui rumah singgah, terutama bagi anak jalanan yang tidak mungkin kembali ke lingkungan keluarga..

d. Basis masyarakat (*community-based*)

Basis ini diarahkan pada hubungan dengan masyarakat, lembaga sosial, terutama hubungan dengan aparat keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan anak jalanan.

e. Basis Keluarga (*family-based*)

Basis ini diarahkan pada pemberdayaan dan peningkatan keluarga, khususnya orang tua melalui usaha ekonomis-produktif serta peningkatan pemahaman tentang fungsi keluarga dan peran orang tua terhadap anak (BKSN,2000:5-6).

3. Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan adalah salah satu diantara sekian banyak pendekatan yang dilakukan untuk menangani permasalahan anak jalanan atau yang sejenisnya. Pendekatan ini secara resmi ada di Indonesia pada tahun 1999 yang ditandai dengan adanya kerjasama antara Departemen Sosial dengan pihak pondok Pesantren dalam penanganan masalah anak jalanan. Pada tahap awal, kerjasama ini melibatkan 65 pesantren dari wilayah Jabotabek serta menjangkau sekitar 4375 anak jalanan yang akan dibimbing oleh pesantren selama satu tahun,

dengan didukung oleh instansi dan organisasi terkait. Kerjasama ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pelatihan pekerja sosial untuk penanganan anak jalanan angkatan pertama. (BKSN,2000:11-12). Pembinaan kesejahteraan sosial anak jalanan melalui pondok pesantren ini merupakan perwujudan dari pendekatan kesejahteraan. Pada dasarnya pendekatan ini berintikan pada pemahaman latar belakang, motivasi, bimbingan dan bantuan sosial, baik secara langsung bagi anak jalanan sendiri maupun lingkungan sosialnya (keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat).

Sedangkan sasaran dari pendekatan kesejahteraan adalah anak yang termasuk rentan menjadi anak jalanan, yaiktu anak yang belum lama menjadi anak jalanan, masih erat berhubungan dengan keluarganya, masih bersekolah atau belum lama meninggalkan sekolah sehingga memungkinkan untuk bersekolah lagi.

4. Konsep Kampanye Sosial

Konsep kampanye sosial adalah sejenis gerakan moral (*moral force*) yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat, peduli terhadap permasalahan-permasalahan sosial semisal permasalahan anak jalanan, anak terlantar, penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya. Pada (BKSN,2000:16) sasaran kampanye sosial ini adalah :

a. Kelompok primer

Kelompok ini terdiri dari anak jalanan dan anak terlantar, keluarga dan masyarakat umum.

b. Kelompok sekunder

Kelompok ini terdiri dari tenaga-tenaga penyedia pelayanan terutama rumah singgah dan panti-panti asuhan swasta.

c. Kelompok tertier

Terdiri dari kelompok-kelompok potensial, termasuk pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait.

Dalam konsep kampanye sosial, media massa memegang peranan penting untuk mencapai keberhasilan. Sebab kampanye sosial tidak lain adalah bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang permasalahan-permasalahan sosial dan penanganannya

5. Pendekatan Psikososial dan Lingkungan

Pada materi kuliah “Psikologi Sosial : Suatu Pengantar” menurut Brehm & Kassir (1996:6) menyatakan bahwa Psikologi Sosial merupakan suatu studi ilmiah mengenai cara individu berfikir (*think*), merasa (*feel*), berkeinginan (*desire*), dan bertindak (*act*), dalam situasi sosial. Pendekatan psikososial ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga (*social casework*), dan pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*), (Depsos,2001:3). Dalam masalah anak jalanan, pendekatan ini menekankan pada keberfungsian aspek-aspek sosial dan psikologis anak yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan anak jalanan. Asumsi yang mendasari pendekatan psikososial dalam mengidentifikasi masalah serta memilih prosedur penyembuhan bagi anak adalah bahwa permasalahan dalam penyesuaian

diri anak bersumber dari gangguan dalam aspek-aspek kepribadian serta tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya, seperti keluarga, tetangga dan masyarakat.

Ada dua unsur penting dalam pendekatan psikososial, yaitu: (1) gagasan tentang orang-dalam-situasi (person – in – situation), dan (2) klasifikasi penyembuhan. Orang-dalam-situasi pada masalah anak menggambarkan suatu kesatuan yang terdiri dari anak, aspek-aspek situasi sosial, serta hubungan yang terjadi antara anak dengan situasi dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, interaksi antara anak dan lingkungan sosialnya dapat dilihat dari perwujudan pertahanan diri anak.

Pertahanan diri anak ini muncul ketika terjadi adanya tekanan, permasalahan-permasalahan yang tidak menyenangkan atau yang membuat kecemasan dari lingkungan sekitarnya. Pertahanan ini biasanya bisa berupa perilaku-prilaku tertentu, seperti melawan, berbohong, melarikan diri dari masalah, dan isolir diri. David O. Sears dalam Psikologi Sosial (1985) menyebutkan bahwa lingkungan yang padat penduduknya akan berakibat pada pendapatan, pendapatan kemudian akan berdampak pada munculnya berbagai tindak kekerasan dan kejahatan. Dari hasil pengkajian ini dapat dipahami bahwa lingkungan sosial sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang ada semisal masalah anak jalanan. Kajian ini dapat dibuktikan dari banyaknya anak jalanan yang ada di kota-kota besar daripada yang ada di kota-kota kecil.

Setelah adanya analisa terhadap lingkungan sosial dan psikologi anak, maka tahap berikutnya adalah tahap penyembuhan. Prosedur penyembuhan ini berbeda-beda sesuai dengan penyebab dan latar belakang masalah dari hasil analisa. Penyebab masalah dari tekanan lingkungan dapat dimodifikasi secara langsung atau anak dibantu untuk mengadakan perubahan sendiri yang dapat menghasilkan perubahan kepribadian yang menguntungkan bagi dirinya. Sedangkan masalah-masalah yang timbul dari dalam diri atau pikirannya dihadapi dengan merubah keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang diperkirakan ada dalam diri anak, yakni dengan cara memeriksa prilaku dan ingatan-ingatan anak saat ini. Prosedur penyembuhan ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap:

a. Ventilasi

Tahap untuk mendorong anak agar mau mengungkapkan perasaan-perasaan ketertekanan yang mengganggu pikirannya.

b. Relasi perbaikan

Tahap untuk menumbuhkan hubungan yang erat antara pekerja sosial dengan anak seperti hubungan seorang ibu kepada anaknya, ini dengan tujuan untuk memutuskan hubungan-hubungan sebelumnya yang tidak memuaskan.

c. Meneliti interaksi pribadi saat ini

Tahap penyembuhan ini dimaksudkan untuk membantu anak agar memahami bagaimana ia saat ini dipengaruhi oleh relasi dan pengalaman-pengalamannya yang telah lewat. Pendekatan psikososial dan lingkungan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam istilah lain dua pendekatan ini sering diistilahkan sebagai pendekatan ganda (Dinsos,2003:10). Pendekatan psikososial menekankan pada keberfungsian aspek-aspek psikologis dan sosial yang menyebabkan berbagai permasalahan anak jalanan. Asumsi yang mendasari pendekatan psikososial dalam mengidentifikasi masalah serta memilih prosedur penyembuhan bagi anak adalah aspek-aspek keperibadian serta tekanan-tekanan yang bersal dari lingkungan baik keluarga maupun masyarakat.

6. Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Pranaka dan Moeljarto dalam buku “Membangun SDM dan Kapabilitas Teknoligi Umat” (2001:28) istilah pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang mengandung pengertian berikut. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan beinovasi dalam mengaktualisasikan diri. Konsep pemberdayaan pada dasarnya lebih luas dari hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net). Namun, substansi pemberdayaan adalah yang seutuhnya adalah memandirikan dan memampukan masyarakat (Bagong S. 2002: 10). Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Demikian juga halnya dengan masalah pemberdayaan anak jalanan, juga dilakukan tidak hanya sebatas individu anak jalanan saja, tetapi juga menyangkut

lingkungan di sekitarnya, baik keluarga, masyarakat, atau lembaga-lembaha sosial semisal rumah singah dan lain sebagainya.

a. Pemberdayaan Anak jalanan

Pemberdayaan anak jalanan bisa dilakukan apabila telah melalui tahap pengkajian secara mendalam terhadap kebutuhan dan potensi anak jalanan serta faktor-faktor yang melatar belakangi anak turun ke jalanan. Setelah pengkajian itulah maka anak jalanan dapat di klasifikasikan dalam kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, dapat diketahui adanya potensi tertentu yang melekat pada diri anak jalanan. Potensi ini menurut penjelasan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu potensi yang melekat pada diri anak jalanan sebagai individu dan sebagai suatu kelompok dari warga masyarakat dan potensi yang terdapat di lingkungan sosialnya baik keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Potensi yang melekat pada diri anak jalanan semisal adanya kecerdasan intelektual atau intelektual quotient (IQ) yang tinggi bisa diberdayakan melalui sarana pendidikan, diberi beasiswa dan sarana kemudahan lainnya agar anak jalanan mau kembali ke sekolah bagi yang putus sekolah atau mengikutkan anak jalanan pada pendidikan luar sekolah. Bisa juga dengan mendaftarkan anak jalanan pada lembaga-lembaga kursus untuk memberikan keterampilan wirausaha an berkarya, memberi modal untuk usaha dan lain sebagainya. Pemberdayaan tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan awal aja, namun semua bentuk bantuan baik berupa pendidikan atau

wirausaha harus dilanjutkan pada tahap pengembangan dan pemberdayaan lanjutan atau hingga anak jalanan bisa mandiri.

b. Pemberdayaan Orang Tua Anak jalanan

Pemberdayaan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bimbingan dan penyuluhan melalui kunjungan rumah, mengundang datang atau pada saat ke rumah singgah (home visite).
- 2) Bimbingan pengelolaan usaha, pengaturan keuangan keluarga dan pemberian modal
- 3) Bimbingan pengasuhan anak (Dinsos,2003:20)

c. Pemberdayaan Lembaga Sosial Penampung Anak Jalanan

Lembaga sosial penampung anak jalanan setidaknya harus memiliki lima bagian atau staf untuk menjalankan aktivitas dan pekerjaan sosialnya (BKSN,2000:100-103). Bagian-bagian tersebut adalah:

- 1) Supervisor
- 2) Pemimpin Rumah singgah atau lembaga
- 3) Pekerja sosial
- 4) Ketua kelompok anak jalanan
- 5) Tenaga Administrasi

Supervisor adalah bagian yang fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membimbing para pelaksana dalam merumuskan rencana program pelaksanaan manajemen.
- 2) Membantu kesulitan para pelaksana

- 3) Membantu pekerja sosial dalam hubungan dengan instansi pemerintah
- 4) Memantau para pelaksana
- 5) Memberi laporan pada Kakanwil atau lembaga lainnya
- 6) Memimpin supervisi sebulan sekali

Pemimpin Rumah singgah bertugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasi kegiatan manajemen maupun pelayanan dan kegiatan
- 2) Memimpin rapat sebulan sekali
- 3) Berkunjung ke lapangan dan ke keluarga anak
- 4) Melakukan monitoring kegiatan
- 5) Melakukan monitoring terhadap pelaksana
- 6) Menghubungi dan membuat kesepakatan dengan sumber yang berkaitan dengan program pelayanan.

Pekerja sosial adalah bagian yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan kunjungan lapangan
- 2) Mengisi formulir anak jalanan dan mempelajarinya
- 3) Memonitoring dan mengunjungi keluarga anak
- 4) Menyusun laporan kemajuan anak yang ditangani
- 5) Menghubungkan anak dengan sistem sumber
- 6) Membuat catatan harian
- 7) Membuat laporan kegiatan-kegiatan

Ketua kelompok anak jalan bertugas sebagai berikut:

- 1) Manjalin komunikasi sesama anak jalanan

- 2) Menjalin komunikasi dengan orang lain di sekitar anak jalanan
- 3) Menjalin komunikasi dengan warga sekitar rumah singgah
- 4) Membuat laporan sebulan sekali mengenai perkembangan anak baik dijalanan maupun di rumah singgah
- 5) Membantu pekerja sosial menganalisis masalah
- 6) Mendampingi kegiatan- kegiatan anak.

Sedangkan tenaga administrasi bertugas sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan berkala
- 2) Mencatat anak yang masuk ke rumah singgah, memeriksa dan membuat laporan triwulan
- 3) Membuat absensi dan laporan pelaksana rumah singgah
- 4) Mengerjakan tugas-tugas administrasi keuangan
- 5) Mengerjakan tugas administrasi surat-menyurat
- 6) Mencatat hasil-hasil kegiatan pekerja sosial

1.5.7.5. Model Penanganan Anak Jalanan

Model Pembinaan terhadap anak jalanan selama ini yang diterapkan pada program pemerintah kerjasama dengan UNDP mulai tahun 1995 hingga sekarang melalui proyek INS/94/007 yang kemudian berkembang menjadi proyek INS/97/001 (BKSN,2000:9-11) diantaranya :

1. Model Rumah Singgah

Rumah singgah adalah suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara

anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi kepada anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Rumah singgah adalah tahapan awal bagi seorang anak untuk memperoleh pelayanan selanjutnya, oleh karena itu penting kiranya menciptakan suasana nyaman, tertib dan menyenangkan bagi anak jalanan.

Tujuan umum rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.
- b. Mengupayakan anak-anak kembali kerumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan
- c. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.

Ada beberapa fungsi rumah singgah, diantaranya sebagai berikut

- a. Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan
- b. Tempat mengkaji kebutuhan anak dan masalah yang dihadapi untuk mencari solusi pemecahannya
- c. Perantara antara anak jalanan dengan orang keluarga
- d. Perlindungan anak dari kekerasan dan penyalahgunaan

- e. Pusat informasi tentang anak jalanan
- f. Jalur masuk pelayanan sosial
- g. Tempat pengenalan nilai dan norma sosial pada anak jalanan

Rumah singgah juga memiliki prinsip-prinsip yang disusun sesuai dengan karakteristik anak jalanan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Semi institusional, anak jalanan bebas keluar masuk
 - b. Pusat kegiatan
 - c. Terbuka 24 jam
 - d. Hubungan informasi
 - e. Bermain dan belajar
 - f. Persinggahan dari jalan ke rumah atau ke alternatif lain
 - g. Partisipasi, dan\
 - h. Belajar bermasyarakat
2. Mobil Sahabat Anak

Mobil sahabat anak adalah sebuah unit mobil keliling yang dimaksudkan untuk mengunjungi dan memberikan pelayanan kepada anak jalanan di tempat-tempat mereka berkumpul atau berada di jalanan. Adapun Tujuan dari pelayanan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan penjangkauan yang mudah dan cepat
- b. Memberikan pendampingan dan pelayanan sosial yang dibutuhkan
- c. Memberikan pelayanan rujukan

3. Model Boarding House atau Pemandokan

Boarding house adalah suatu wahana pelayanan lanjutan bagi anak jalanan yang bertujuan untuk; (1) mempertahankan sikap dan perilaku positif, (2) memberikan kesempatan kepada anak jalanan untuk memperoleh pelayanan lanjutan dalam rangka penuntasan masalah mereka, dan (3) mempercepat proses kemandirian anak jalanan.

Dalam hal ini penelitian lebih difokuskan pada model penanganan anak jalanan melalui Rumah Singgah. Model ini sistem pengelolannya dikelola oleh para LSM / LSK, dengan standart pembinaan sesuai acuan pemerintah (sistem paket). Namun jika memandang hal ini dengan “kaca mata kuda” titik keberhasilan pembinaan terhadap anak jalanan jangan diharap dapat berhasil baik. Oleh karenanya LSM dituntut untuk berlaku luwes dalam mensinkronkan antara kebutuhan pembinaan anak jalanan sesuai sasaran dengan sistem paket yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi terdapat adanya pengembangan dari model yang ada, demi suksesnya program pembinaan bagi anak jalanan tersebut

1.5.8. Hak Anak Dalam Konsep HAM

Konvensi Hak Anak (KHA) atau kata lainnya adalah Traktat atau Pakta adalah suatu perjanjian yang mengikat secara yuridis dan juga politik. Konvensi Hak Anak (KHA) kata aslinya adalah Convension On The Ringht of The Child (CRC) yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang fokusnya pada penanganan hak anak. KHA merupakan instrumen internasional yang dibuat secara universal

dengan tidak membedakan hak anak di seluruh dunia. Setiap negara yang mengakui hak anak akan meratifikasi Konvensi hak Anak (KHA) sebagai salah satu instrumen hukum yang terikat secara hukum untuk melaksanakan isi yang terkandung di dalam konvensi tersebut (BKSNI, 2000:11).

Adanya Konvensi hak anak (KHA) ini dilatar belakangi oleh reaksi dari penderitaan yang terjadi akibat bencana peperangan pada pasca perang dunia I. Penderitaan yang paling terlihat pada saat itu adalah terjadi pada kaum perempuan dan anak-anak. Inilah yang kemudian menggugah para aktifis perempuan untuk mengadakan gerakan peduli terhadap nasib anak-anak. Sedangkan perumusan pertama mengenai Konvensi Hak anak baru terjadi pada tahun 1979 ketika dicanangkan pertama kali "Tahun Anak Internasional". Pada saat itu, Negara Polandia mengajukan sebuah usulan agar dilakukan perumusan dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis. Rancangan Konvensi Hak Anak (KHA) ini baru bisa diselesaikan sepuluh tahun kemudian dan kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan pada saat itu juga KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional.

Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) oleh PBB ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu: (1) menetapkan standar universal hak-hak anak, dan (2) melindungi anak-anak dari eksploitasi penyalahgunaan dan penganiayaan. Oleh karena itulah, Konvensi Hak Anak (KHA) harus bersifat universal, tidak diskriminatif dan rasialis.

Hal ini untuk kepentingan seluruh anak di dunia. Dari sinilah maka konvensi hak anak (KHA) menetapkan beberapa prinsip dasar sebagai pijakan, yakni:

1. Non diskriminasi

Hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak akan membedakan suku, agama, keyakinan, etnik, latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, serta latar belakang sosio ekonomi.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child)

Segala sesuatu atau tindakan yang diambil oleh (KHA) mengenai anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan bagi pembuat policy (pembuat kebijakan atau kelompok tertentu).

3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development)

Konvensi Hak Anak (KHA) menjamin hak hidup yang melekat pada anak tanpa terkecuali.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child)

yang dimaksud disini adalah setiap anak mempunyai hak untuk berpendapat atas suatu masalah yang menimpa dirinya, termasuk dalam menentukan arah pendidikan atau keluarga.

Apabila sebuah negara telah meratifikasi KHA, maka konsekwensinya adalah negara tersebut berkewajiban untuk melaksanakan seluruh isi yang terkandung dalam KHA, tetapi jika negara yang bersangkutan tidak mengimplementasikan KHA dengan baik maka akan dikenai sanksi moral. Dalam Konvensi hak anak (KHA) ada lima ketegori umum menyamgkut hak-hak yaitu:

1. Hak-hak sipil dan kemerdekaan, meliputi:
 - a. Memperoleh identitas, pasal 7
 - b. Mempertahankan identitas, pasal 8
 - c. Kebebasan berekspresi, pasal 13
 - d. Kebebasan berpikir, beragama, dan berhati nurani, pasal 14
 - e. Kebebasan berserikat, pasal 15
 - f. Memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadi, pasal 16
 - g. Memperoleh informasi yang layak, pasal 17, dan
 - h. Memperoleh perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan, pasal 37
 - i. Lingkungan keluarga dan pilihan bentuk-bentuk pemeliharaan (*family environment and alternative care*).

Melihat situasi dan kondisi anak yang masih bergantung pada orang tua , maka diberikan ketentuan untuk mendapatkan pemenuhan kehidupan dan perkembangannya oleh keluarga. Pasal-pasal yang terkait didalamnya adalah : pasal 1,2, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, dan 39. Pasal-pasal ini meliputi kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah agar hak dasar anak, untuk memperoleh keluarga atau keluarga pengganti untuk melakukan tanggung jawabnya secara maksimal.

2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare)

Yakni hak-hak anak untuk memperoleh standar hidup yang layak, sehingga fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak berkembang dengan baik, dengan kata

lain hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

Pasal-pasal yang mengatur hal adalah: pasal 1-3, 6 (2), 18 (3), 23, 24, 26, dan 27.

3. Kegiatan-kegiatan pendidikan, rekreasi, dan budaya (education, leisure and culture activities)

Hak-hak anak untuk berkembang dengan terpenuhinya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, waktu luang untuk bermain dan kegiatan budaya yang berpengaruh terhadap perkembangan intelektualitas dan psikologis. Hal ini diatur dalam pasal: 28, 29, dan 31.

4. Perlindungan khusus (special protection measures)

Ada beberapa kategori anak yang mendapatkan perlindungan khusus, yakni:

- a. Pengungsi anak, pasal 22
- b. Anak dalam konflik bersenjata, pasal 38
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum (perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum), pasal 37, 39, dan 40.
- d. Anak dalam situasi eksploitasi (eksploitasi ekonomi, narkoba, seksual, perdagangan anak), pasal 32, 33, 34, 35, 36, dan 39).
- e. Anak berasal dari kelompok minoritas dan pribumi (tidak boleh ada diskriminasi), pasal 30.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Perspektif Pendekatan Penelitian

Analisis adalah proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997, hal 34). Pada prinsipnya perspektif pendekatan penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian yaitu Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang

Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan metode yang digunakan harus dapat sesuai dengan masalah penelitian, namun demikian setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan, maka untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan metode yang dapat saling mengisi dan melengkapi.

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam suatu garis pemikiran yang tidak bisa. Ada beberapa jenis penelitian antara lain, penelitian survey, eksperimen, grounded, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan analisa data sekunder. Singarimbun (Efendi, 2007:3). Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis serta wawancara mendalam secara langsung.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001:3) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian akan dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata dengan memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti. Menurut Singarimbun (2001:4) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta aktual yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi program pembinaan anak jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang

1.6.2.Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengevaluasi evaluasi program pembinaan anak jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di rumah singgah Setara Jalan Tumpang 5a Semarang

1.6.4. Fenomena Yang Diamati

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengamati variabel-variabel yang berkaitan dengan program pembinaan melalui rumah singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang. Dari implementasi tersebut membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi program pembinaan anak jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang, yang meliputi fenomena dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis, Crossfield & Byrner, dan Badjuri & Yuwono yaitu :

1. Input (masukan)
2. Process (proses)
3. Outputs (hasil)
4. Outcomes (dampak)

Adapun fenomena yang ingin diamati berkaitan dengan konsep tersebut adalah :

1. Input, yaitu diamati dari gejala :
 - a. sumberdaya pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pembinaan melalui rumah singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang..
 - b. Sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan
2. Proses, yang diamati dari gejala :
 - a. kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pembinaan anak jalanan
 - b. efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembinaan melalui rumah singgah Setara bagi anak jalanan di Kota Semarang.

c. Hasil, diamati dari gejala :

- 1) Peran rumah singgah Setara dalam mendukung kebijakan pendampingan anak jalanan di Kota Semarang.
- 2) Bentuk-bentuk pendampingan anak jalanan yang dilakukan oleh rumah singgah Setara bagi anak jalanan di Kota Semarang.

d. Dampak, diamati dari gejala :

- 1) dampak yang diterima oleh anak jalanan dengan pembinaan yang dilakukan oleh rumah singgah Setara
- 2) dampak positif dan negatif dari kebijakan pembinaan melalui rumah singgah Setara bagi anak jalanan di Kota Semarang.

1.6.5. Instrumen Penelitian

Penerapan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini memberikan keterkaitan yang sangat besar antara peneliti dengan penelitian yang dijalankan. Keterkaitan tersebut disebabkan oleh peran penelitian sebagai perencana, pelaksana pengumpul, penganalisa, penafsir data, dan pada akhirnya pelapor hasil penelitiannya, seperti yang dikemukakan oleh Moleong (1996:121). Peran peneliti dalam mengungkap fenomena yang ada di lapangan yang sebelumnya tidak dirumuskan dalam pedoman wawancara dan observasi. Dengan demikian instrumen dalam penelitian yang digunakan sebagai alat Bantu dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Interview Guide yaitu menggunakan pertanyaan terbuka untuk melakukan wawancara secara mendalam dan menggunakan alat bantu berupa tape recorder serta kamera foto.
2. Dokumentasi yakni upaya pengambilan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan data yang diperlukan

1.6.6.Pemilihan Informan

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Selanjutnya dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik “snowball” yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di rumah Setara Semarang. Aktor tersebut antara lain :

1. Ketua Rumah Singgah
2. Sekretaris Rumah Singgah
3. Pengurus harian

4. anak jalanan

Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang., subyek informan lainnya didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data di lapangan. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subyek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya, karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

1.6.7. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di daerah penelitian (Bungin, 2001:123). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini meliputi : observasi/pengamatan, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi

Di dalam penelitian kualitatif metode pengamatan berperan serta sangat penting, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lengkap sesuai dengan setting yang dikehendaki. Peneliti kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena. Disinilah diperlukan kehadiran peneliti untuk mengetahui langsung kondisi dan fenomena di lapangan. Hubungan kerja lapangan antara subyek penelitian dan peneliti merupakan suatu keharusan dalam pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif

(Danim, 2002: 121). Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan banyak tentang masalah obyek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis, artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain, selain itu hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah (Nasution, 2002: 107). Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian, sebagai cirri khasnya adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan, data kualitatif disebut sebagai data primer karena data yang diambil dari sumber pertama subjek penelitian di lapangan (Bungin, 2001: 128).

2. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2002: 113). Sedangkan Mulyana (2002: 180) mengatakan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam

wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah informan yang representative ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. (Moleong, 2001). Sedangkan metode wawancara tak berstruktur/terbuka, menurut Mulyana (2002: 181) bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Ada 3 (tiga) karakteristik wawancara tak berstruktur/terbuka yaitu :

- a. memungkinkan informan menggunakan cara-cara unik mendefinisikan pendapatnya
- b. mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetapi pertanyaan yang sesuai untuk semua responden/informan
- c. memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal (Denzin dalam Mulyana, 2002: 182)

Senada dengan Denzin, Nasution (2002: 119) juga mengatakan bahwa wawancara terbuka memungkinkan informan spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian pewawancara memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah itu, karena setiap informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat memperkaya pandangan peneliti. Dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk:

- 1) memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya bagaimana pelaksanaan pembinaan melalui rumah singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang.
- 2) memperoleh informasi dengan cepat dan langsung dari informan
- 3) memperoleh jawaban yang valid berdasarkan mimik, emosi informan saat memberikan informasi/pendapat
- 4) memperoleh jawaban yang akurat karena apabila ada salah penafsiran dari informan, peneliti dapat langsung memperbaiki/meluruskan pertanyaan yang dimaksud oleh peneliti.

Data penelitian kualitatif merupakan data material mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk catatan/rekaman dari bidang yang dikaji/diteliti. Data itu kemudian berakumulasi menjadi sesuatu yang bermakna, sekaligus sebagai basis merekonstruksi dasar analisis atas data itu (Danim, 2002: 162).

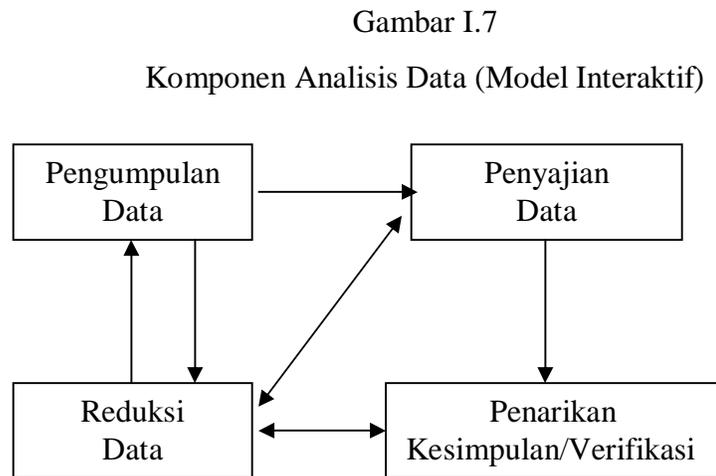
1.6.8. Teknik Analisis Data

Untuk memberi pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Sebagaimana dikatakan Arikunto (1998: 194), penelitian yang menjawab problematika serta ingin mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, lebih tepat digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dipilihnya teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah kebijakan pembinaan melalui rumah singgah bagi anak

jalanan di Kota Semarang.. Penelitian akan melibatkan pencarian data dari orang tua. Langkah yang ditempuh dengan mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel atau buku-buku pedoman dan sebagainya (Moleong, 2001: 103). Data juga diperoleh dari internet atau surat kabar berkaitan dengan masalah. Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Komponen analisis data (model interaktif) dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Miles dan Huberman (terjemahan Tjejep Rohedi) 1992

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu, penyederhanaan, memfokuskan, atau menyeleksi untuk menajamkan data yang diperoleh. Penyajian data dimaksudkan sebagai proses analisis untuk merakit temuan data di lapangan

dalam bentuk matriks, tabel, atau paparan-paparan deskriptif dalam satuan-satuan kategori bahasan dari yang umum menuju yang khusus, dalam istilah Spradly (1980) disebut dengan analisis domain, taksonomik, dan komponensial.

Akhirnya berdasarkan sajian data tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah terlebih dahulu melihat hubungan satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasan. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan memberi makna terhadap fenomena/gejala yang ditemukan. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih memperkaya dan mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah berdirinya Yayasan Setara

Sebelum berdiri menjadi sebuah LSM dan memiliki akte notaris, kegiatan yang dilakukan bersama para anak jalanan sudah lama dilakukan dalam bentuk kelompok kerjaa. Kelompok ini telah berdiri sejak tahun 1993 dan merupakan kelompok pertama yang memberikan perhatian dan melakukan intervensi langsung terhadap anak jalanan di Semarang. Pada tanggal 11 Maret 1999, dan diakta notariskan pada tanggal 21 April 1999 di kantor Notaris J. Kartini Soejendro dengan nomor akta 14, Yayasan Setara berdiri dan resmi berbadan hukum.

Yayasan yang beralamat di jalan Tumpang Raya no 94 Semarang ini memiliki pengalaman kerjasama dalam International Relief Development (tahun 2000), Microsoft Indonesia (2003-2004), Terre des Hommes Germany (1996 – Desember 2006), UNICEF Indonesia (tahun 1999, Juni-Juli 2002 dan Mei 2004), Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (1996 – 2001), NOVIB Netherland (2000-2001) & (2005 – 2007).

Yayasan Setara juga memiliki keterlibatan dalam jaringan Forum Masyarakat Pemerhati Anak (FMPA) Jawa Tengah, Forum NGO untuk Anak Jalanan Jawa Tengah dan DIY, Indonesia Againts Child Trafficking Campaign (Indonesia ACTs), Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)

Semarang, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah, Koalisi Nasional NGO untuk Monitoring Pelaksanaan KHA, Konsorsium Anak Jalanan Indonesia, dan Konsorsium *Basic Social Service for Needy Children*.

Yayasan Setara juga pernah menerbitkan beberapa buku, diantaranya adalah Anak Jalanan Perempuan (2000), Eksploitasi Seksual terhadap Anak: Berbagai Pengalaman Penanganannya (2000), Prostitusi Anak Jalanan di Simpang Lima (2004), Anak Bukanlah Pemuas Nafsu (2004), Dibawah Bayang-bayang Ancaman: Dinamika Kehidupan Anak Jalanan (2004), Pendidikan Dasar bagi Pendamping Anak (2004), dan Belajar dan Bekerja Bersama Anak Jalanan (masih dalam proses terbit).

2.2. Visi Misi dan Kegiatan Yayasan Setara

Visi dari Yayasan Setara adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak-anak khususnya yang berada dalam situasi sulit atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Sedangkan Misi dari yayasan ini adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan penghormatan masyarakat luas terhadap hak-hak anak.

Adapun strategi yang diterapkan oleh Yayasan Setara adalah melakukan pencegahan agar anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi agar tidak menjadi anak jalanan, memberikan dan mendesak agar negara memberikan perlindungan bagi anak jalanan dari berbagai ancaman, mengupayakan agar anak-anak jalanan dapat keluar dari dunia jalanan dengan berkumpul atau berintegrasi kembali

dengan orangtua atau keluarga, dan membuka ruang-ruang partisipasi anak.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Setara adalah:

1. Memberikan beasiswa kepada anak jalanan dan anak yang rentan menjadi anak jalanan sebagai upaya untuk mencegah atau mengeluarkan anak dari jalanan.
2. Penyediaan rumah singgah bagi anak jalanan dan shelter khusus untuk anak jalanan perempuan.
3. Menyelenggarakan pendidikan alternatif dan pendidikan keterampilan bagi anak jalanan.
4. Memberikan dukungan psikologis.
5. Melakukan advokasi atas kasus-kasus anak.
6. Memonitoring pelanggaran hak-hak anak.
7. Studi atau penelitian.
8. Membangun lima forum orangtua anak jalanan.
9. Pelayanan kesehatan.

2.3. Susunan Kepengurusan Yayasan Setara

Badan Pengurus dari Yayasan Setara adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Prof. Dr. PH Dewanto, Med.
2. Sekretaris : DR. Esmi Warassih SH Mhum
3. Bendahara : Dra. Frieda NRH, MS

4. Anggota : Drs. Darmanto Jatman, SU
Mohammad Farid
Adriani Sumantri Sumampan
Odi Shalahuddin
5. Pengurus Harian: Hening Budiawati
6. Staff Lapangan : Silvi, Ira, Novi, Yuli BDN
7. Bagian Keuangan: Ika, Lia
8. Bagian database: Sari
9. Bagian perpustakaan : Hanna

Staff lapangan dan Staff kantor bertanggung jawab kepada pengurus harian. Staff lapangan bekerja di lapangan, serta berinteraksi langsung dengan para anak jalanan. Sedangkan staff bagian keuangan bertanggung jawab untuk mengurus keluar masuknya uang dalam yayasan. Staff bagian database bertanggung jawab untuk melakukan coding membuat database anak-anak bimbingan Setara. Staff bagian perpustakaan bertanggung jawab terhadap peminjaman buku-buku koleksi Setara, dan juga membuat kliping-kliping mengenai artikel yang berhubungan dengan anak jalanan dan bidang kerja Setara

Dalam pelaksanaannya di lapangan, staff kantor dibantu oleh beberapa orang tutor dan volunteer – volunteer dari para mahasiswa yang tertarik mengenai permasalahan anak jalanan. Tutor dan volunteer ini membantu dalam pendidikan informal untuk para anak jalanan.

2.4. Pedoman dasar program kerja

Dalam melakukan semua kegiatannya, LSM ini berpegang pada Konvensi Hak Anak. Hukum yang mengatur mengenai berbagai hak seorang anak. Terutama 5 Hak dasar anak, yaitu hak sipil kemerdekaan, hak pengasuhan, hak pendidikan, hak perlindungan khusus dan hak kesehatan. Dalam prakteknya pendekatan kepada para anak jalanan ini dilakukan oleh para pendamping per individu anak. Setiap anak diperhatikan apakah hak-haknya telah dipenuhi atau belum. Jika belum maka akan dilakukan upaya-upaya agar hak mereka terpenuhi. Mengenai hak sipil kemerdekaan, yang paling utama adalah masalah akte kelahiran. Karena akte ini merupakan identitas diri dan bukti status kewarganegaraan. Bagi mereka yang belum memilikinya, akan diusahakan oleh yayasan ini.

Dalam hak pengasuhan, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Oleh karena itu setiap anak perlu dimonitor mengenai hubungannya dengan orangtuanya, dimana mereka tinggal, dan siapa yang mengasuh mereka.

Dalam hak pendidikan disebutkan, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk juga bagi anak yang menyandang cacat. Perlu didata mengenai status pendidikan setiap anak. Bagi

mereka yang sudah tidak bersekolah maka dilakukan upaya- upaya untuk membawa mereka kembali bersekolah. Jika tidak dapat melalui pendidikan formal, maka ditempuh cara pendidikan non formal dengan kejar paket ataupun pendidikan informal.

Mengenai hak perlindungan khusus ini merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak penyandang cacat, anak korban perlakuan salah, dan penelantaran. ("UU Perlindungan Anak" 5) Dari pendampingan, dicari informasi mengenai pekerjaan mereka, dari sana dipantau mengenai lingkungan pekerjaan mereka, dan juga mengenai masalah gaji yang diberikan. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum, pihak LSM memberikan pendampingan kepada anak-anak tersebut dalam menyelesaikan kasusnya.

Dalam hak kesehatan disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.. Untuk itu dilakukan monitoring terhadap kesehatan para anak jalanan dengan mendata riwayat kesehatan mereka.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Seperti yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, bahwa pembahasan penelitian ini, merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis, Crossfield & Byrner, dan Badjuri & Yuwono. Berdasarkan rujukan tersebut terdapat empat aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keempat aspek tersebut yakni : Pertama, input dengan mengamati (a) sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; (b) Sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan. Kedua, proses dengan mengamati (a) kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; (b) efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Ketiga, hasil dengan mengamati (a) hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik; (b) berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan. Keempat, dampak dengan mengamati (a) dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan; (b) dampak positif dan negatif dari kebijakan.

Awal penelitian memberikan gambaran yang luas dan umum mengenai evaluasi pencapaian tujuan program pembinaan melalui Rumah Singgah Setara bagi anak jalanan di Kota Semarang secara menyeluruh. Pembahasan berikutnya dilakukan analisis yang terfokus pada suatu dominan atau sub-sub domain tertentu berdasarkan analisis taksonomi Domain yang muncul akan memiliki dua sifat yaitu domain superior yang merupakan domain yang penting dan mendominasi hampir

sebagian besar diskripsi penelitian, dalam hal ini terfokus pada pencapaian tujuan program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang. Dilain pihak terdapat domain superior yang merupakan domain yang penting dan mendominasi hampir sebagian besar diskripsi penelitian. Domain inferior yaitu merupakan domain pendukung yang menguraikan analisis dari aspek pelayanan terhadap anak-anak jalanan maupun aspek ketersediaan sarana dan prasarana rumah singgah Setara. Hal ini dilandasi suatu pemikiran bahwa sebagai suatu penelitian sosial yang melakukan pengamatan terhadap proses pelayanan sosial anak jalanan, substansinya adalah menerangkan atau mendeskripsikan suatu fenomena sosial.

Untuk menerangkan suatu fenomena sosial peneliti memerlukan setidaknya instrumen ilmiah yang meliputi : (1) logika atau rasionalitas, dan (2) observasi atau pengamatan langsung terhadap fakta-fakta empiris dilapangan, yakni permasalahan sosial anak jalanan yang penanganannya dilakukan melalui sistem rumah singgah. Pemahaman ilmiah atas realitas sosial harus berlandaskan sesuatu yang logis, dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan apa yang kita amati dilapangan.

3.1. Input

Input, yaitu diamati dari gejala adalah sumber daya. Sumber daya yaitu semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber daya program pembinaan anak jalanan di rumah singgah Setara Kota Semarang terdiri

dari sumber daya manusia, sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan

3.1.1. Sumberdaya Pendukung

Anak jalanan yang dibina dirumah singgah jumlahnya bervariasi, antara 100 – 251 anak dan sebagian besar adalah anak laki-laki. Namun semuanya tidak menetap dirumah singgah, mayoritas dari anak jalanan tersebut sifatnya hanya mampir / singgah secara rutin atau berkala sesuai program dan mengikuti kehendak hati anak tersebut tergantung dari kedekatan para pendamping dalam melakukan pembinaan, sehingga kedekatan ini yang akan menentukan anak jalanan tertarik atau tidak dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan dirumah singgah. Kalaupun ada yang tinggal itupun tidak lebih dari 15 anak. Walau pengertian rumah singgah dalam hal ini bukanlah untuk tempat tinggal, tapi merupakan tempat dimana pembinaan itu dilaksanakan.

Sumber daya yaitu semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum rumah singgah setara mempunyai latar belakang dan program pembinaannya antara satu dengan yang lainnya hampir sama. Kesamaan ini dianalisa dan dipandang dari sudut kondisi kebutuhan anak jalanan yakni kondisi fisik dan rohani yang kurang berdaya atau bahkan dikatakan tidak berdaya karena memang tidak diberdayakan dan tidak ada

yang dipakai untuk memberdayakan. Dalam pembinaan anak jalanan di perlukan sumber daya pendukung.

Sumberdaya pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di rumah singgah Setara meliputi perlengkapan administrasi, sarana belajar, sarana hiburan dan perlengkapan rumah tangga. Sumber daya pendukung semuanya mencukupi baik itu di rumah Singgah Setara, Seperti yang disampaikan Hening Budiyawati (Pengurus Harian Yayasan Setara Semarang)

“ sarana dan prasarana di rumah singgah Setara Semarang sangat mencukupi, alokasi anggarannya cukup” (Wawancara : Senin- 9 April 2012)

Sedangkan menurut Mohammad Farid (Anggota Yayasan Setara Semarang) menyatakan hal senada bahwa :

“ Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah “anak-anak”, sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak dapat terus mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan sarana dan prasarana yang memadai”. (Wawancara : Rabu-11 April 2012)

Sedangkan menurut Hening Budiyawati Pengurus Harian rumah singgah Setara menyatakan hal senada bahwa :

“sarana dan prasarana di rumah singgah Setara Semarang mencukupi dan memadai”
(Wawancara : Rabu- 11 April 2012)

Berikut sumber daya pendukung di rumah Singgah Setara Semarang

1. Perlengkapan administrasi

Rumah Singgah Setara Semarang memiliki satu ruangan administrasi. Anak jalanan tidak dapat masuk ke ruang administrasi tanpa ada kehadiran pengurus di dalam ruangan tersebut, yang disajikan dalam gambar berikut.

Gambar III.1
Foto ruangan administrasi Rumah Singgah Setara Semarang



Gambar III.2
Foto tempat duduk tamu ruang administrasi Rumah Singgah Setara Semarang



2. Perpustakaan

Perpustakaan Rumah Singgah Setara Semarang telah tersedia dengan ukuran ruangan kurang lebih 16M2 (4x4) dengan fasilitas meja/kursi dan koleksi pustaka yang memadai.

Gambar III.3.
Foto Ruang Perpustakaan



Gambar: IV.4
Administrasi Pelayanan Perpustakaan



Gambar: IV.5
Foto Koleksi Buku Perpustakaan



Pengelolaan perpustakaan Rumah Singgah Setara Semarang belum ditangani secara profesional sebagaimana layaknya sebuah sarana penunjang pendidikan seperti manajemen tidak jelas, katalog indek, pengarang maupun judul belum diolah, waktu layanan yang masuk terbatas pada jam kerja.

3. Sarana Pertemuan dan belajar

Sarana pertemuan dan belajar yang tersedia di Rumah Singgah Setara Semarang menempati ruang meeting meliputi meja besar, dua whiteboard dan satu komputer. Sarana belajar ini masih dalam kondisi baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap anak binaan. Berkenaan fasilitas belajar sebagai penunjang kegiatan pelayanan masih banyak yang harus dibenahi. Antara lain: pada komputer suplai listrik tidak mencukupi, tidak ada pengelola khusus, kebersihan tidak terjaga, kursi yang tidak sesuai jumlah dan spesifikasinya.

Gambar III.6.
Foto Ruang Pertemuan dan Belajar



4. Perlengkapan rumah tangga

Rumah Singgah Setara Semarang menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan oleh anak binaan dan pengurus berupa satu kompor, perlengkapan masak dan seperangkat alat makan.

Gambar III.7.
Foto Ruang Dapur



Gambar III.8.
Foto Ruang Kamar Mandi



Perlengkapan mandi setiap anak binaan disediakan pula oleh pihak Rumah Singgah Setara Semarang.

Gambar III.9.
Foto Ruang Kamar Tidur



Ruang tidur anak binaan ada yang dilengkapi kasur namun ada pula anak binaan yang tidur dengan beralaskan karpet. Pada awalnya setiap kamar anak binaan dilengkapi dengan springbed, namun kasur tersebut sering dijadikan tempat bermain anak binaan yang menyebabkan rusaknya kasur tersebut. Setiap ruang

tidur terdapat satu lemari. Setiap anak binaan dapat menggunakan lemari tersebut untuk menyimpan barang mereka

Berdasarkan wawancara dan tampilan foto sumber daya pendukung di rumah Singgah Setara Semarang, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya pendukung yang diperlukan pembinaan anak jalanan di rumah singgah Setara tergolong cukup baik, dengan demikian tidak adanya masalah pada tahap ini.

3.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam pembinaan anak jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang adalah para petugas pengelola rumah singgah. Pengelola Rumah Singgah Setara Semarang meliputi antara lain Ketua rumah singgah, Anggota atau para pekerja sosial, ketua kelompok anak jalanan dan tenaga administrasi rumah singgah

Seperti yang disampaikan Esmi Warassih (Sekretaris Yayasan Setara Semarang) yaitu:

Pengurus rumah singgah Setara memberikan pelayanan social sebagai wujud komitmen serta kepedulian mereka untuk membantu anak-anak jalanan kearah terwujudnya kesadaran, kepedulian dan dukungan terhadap program penanganan permasalahan sosial anak jalanan di kawasan Kota Semarang. Dalam melakukan kegiatan pendampingan, latar belakang pendidikan para petugas Yayasan Setara Semarang rata-rata berbasis ilmu pekerjaan sosial. Keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap permasalahan sosial anak jalanan penanganannya akan memperoleh hasil yang optimal apabila dilakukan melalui pendekatan profesi pekerjaan sosial”.

(Wawancara : Rabu- 11 April 2012)

Dari pedoman wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Rumah Singgah Setara Semarang sangat berkompeten dalam pembinaan anak jalanan di Kota Semarang. Dengan melihat latar belakang pendidikan pengurus Rumah Singgah Setara Semarang yang berpendidikan Sarjana, Magister dan Doktor maka sangat mudah bagi mereka untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini memperkuat bahwa sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya kebijakan pembinaan anak jalanan tergolong baik.

3.2. Proses

3.2.1. Kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pembinaan anak jalan

Hak-hak anak untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dan berkreasi dirasa belum terwadahi sepenuhnya dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan misalnya masih melihat anak sebagai obyek. Anak belum dipandang sebagai subyek yang memiliki hak dan potensi untuk berpartisipasi dan kemampuan berkreasi dalam proses belajar mengajar.

Saat ditanya tentang programnya, Hening Budiyawati Pengurus Harian rumah singgah menjawab :

" Dalam menentukan program pembinaan, yang jelas disesuaikan dengan visi dan misi yang ada. Diantara program yang kami berikan : satu, pendidikan, pelatihan dan magang; dua, pemberdayaan ekonomi orang tua; tiga, lingkungan hidup; empat, sistem rujukan (panti dan sekolah formal)".
(Wawancara : Senin-16 April 2012)

Model dan kegiatan pembinaan moral anak jalanan di Rumah Singgah selama ini, tergabung dalam layanan *resosialisasi* dan pendidikan, diantaranya; (1) kegiatan keagamaan yang antara lain peringatan hari besar agama; (2) pengajaran dan diskusi tentang norma sosial; (3) bimbingan sosial kasus, baik yang terjadi di keluarga, sekolah, maupun lokasi tempat kerja anak jalanan, dan; (4) kunjungan ke rumah orang tua anak jalanan dalam rangka penyatuan kembali dengan keluarganya. Jadi, belum ditemukan metode khusus spesifik yang aplikatif dalam membenahi moralitas negatif anak jalanan selama ini. Sedangkan layanan-layanan lain yang selama ini sudah dilakukan, antara lain; (1) penjangkauan dan pendampingan di jalanan; (2) beasiswa dan registrasi; (3) bantuan makan dan kesehatan; (4) pemberdayaan untuk anak jalanan, dengan berbagai keterampilan dan *skill*.

Setelah dilakukan penelitian lapangan dan wawancara lebih dalam tentang model pembinaan moral anak jalanan di Rumah Singgah ini, didapatkan kurang lebih sepuluh model pembinaan. Diantaranya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hening Budiawati Pengurus Harian rumah singgah :

Di Rumah Singgah Setara ini Mas: pembinaan yang dilakukan untuk hal ini, antara lain: bimbingan perindividu, bimbingan sosial kelompok, bimbingan orangtua, bimbingan melalui guru kelas (guru BK) bagi anak jalanan yang masih sekolah, bimbingan keagamaan dan rekreasi edukasi. Untuk seterusnya Mas:

- a) **Bimbingan perindividu:** Bimbingan perindividu, dilakukan atau dilaksanakan di jalanan. Tujuannya untuk mengenal, mendampingi dan menjalin komunikasi dengan anak jalanan, dengan kegiatan, antara lain: konseling, diskusi dan sharring pengalaman. Kegiatan ini berorientasi pada usaha menangkal pengaruh-pengaruh negatif dan membekali anak jalanan dengan nilai-nilai atau wawasan positif.

- b) **Bimbingan sosial kelompok:** Bimbingan sosial kelompok, **dilaksanakan** dengan cara mengumpulkan anak jalanan serta pendampingan pekerja sosial untuk mengkaji permasalahan yang sama (seperti di atas). Bimbingan dilaksanakan dalam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat konsep perubahan sikap dan perilaku anak. Kegiatan yang dilaksanakan Rumah Singgah Setara adalah pertemuan anak jalanan tiap dua minggu sekali dalam bentuk kelompok.
- c) **Bimbingan orangtua:** Bimbingan orangtua, bertujuan membantu orangtua anak jalanan untuk meningkatkan kapasitas orangtua anak jalanan dalam pengasuhan, pendidikan, dan usaha ekonomi produktif, nilai-nilai dan cara-cara mengatasi masalah anak. Metode yang dilakukan, antara lain: kunjungan rumah (home visit), konsultasi dilakukan setiap saat, pertemuan tiap dua minggu sekali dalam kelompok pengajian “yasinan dan tahlil”.
- d) **Bimbingan melalui guru kelas (guru BK) bagi anak jalanan yang masih sekolah:** Sebagai usaha preventif agar anak jalanan yang sekolah tetap bersekolah (tidak DO), karena ada perbedaan karakteristik anak jalanan yang sekolah dengan anak yang bukan anak jalanan. Karena guru BK mempunyai peranan yang penting utamanya dalam membantu membenarkan sikap anak didiknya, diharapkan mampu memberikan solusi jika terjadi masalah dengan anak jalanan yang ada di sekolah.
- e) **Bimbingan keagamaan:** Sebagai usaha preventif untuk **menangkal** sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pendidikan agama di berikan pada anak jalanan dengan materi-materi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yang dikaitkan dengan ajaran agama. Harapan dari kegiatan ini agar anak jalanan mempunyai bekal keagamaan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Misalnya: minum-minuman keras, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya.
- f) **Bimbingan rekreasi edukasi:** Rekreasi edukasi adalah sebagai sarana mengajak anak jalanan untuk lebih mengenal diri sendiri (refleksi diri) baik potensi, bakat dan minatnya. Dengan metode rekreasi yang dipadukan dengan kegiatan-kegiatan permainan edukatiif dan menyenangkan bagi anak.
(Wawancara : Senin-16 April 2012)

Beberapa model pembinaan tersebut juga pernah dialami Eko (Anak jalanan Rumah Singgah Setara), dia mengutarakan pengalamannya selama berada di Rumah Singgah Setara, berikut ini ungkapannya:

Kayak tadi Mas: paling kalau ada acara-acara penting seperti bimbingan kesehatan, pengarahan dari kepolisian, keterampilan dan acara-acara keagamaan dari pengurus atau yang lain, kita dipanggil kesana dan ikut, atau kita pulang ke Rumah Singgah kalau ada perlu aja. Seperti: minta bantuan berobat atau yang kita perlukan saat itu.

- a) **Bimbingan dari Dinas Kesehatan Mas:** seperti kita diberi pengarahan tentang berbagai bahaya penyakit akibat dari melakukan pergaulan bebas, ngepil, dan cara-cara hidup sehat.
- b) **Kalo dari pihak Kepolisian:** lebih memberikan pengarahan terhadap kita tentang cara untuk patuh hukum, tidak mencuri, mengganggu ketenangan umum dan lain sebagainya. Atau tentang sanksi hukum yang diberikan bila kita tidak lagi bisa taat hukum.

(Wawancara : Senin-16 April 2012)

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap tentang model pembinaan anak jalanan ini, peneliti juga mencantumkan penjelasan dari Ibu Reni (Tetangga dekat Rumah Singgah Setara), sebagai berikut:

Model pembinaan moral anak jalanan di Rumah Singgah Setara, antara lain: upaya pembinaan yang melibatkan tokoh masyarakat tentang arti dan pentingnya norma dan nilai-nilai yang baik di masyarakat, orangtua tentang pentingnya pendidikan dan dukungan untuk kebaikan moral anak, pihak kepolisian tentang pentingnya taat hukum dan sanksi bagi pelanggar hukum, serta dinas kesehatan tentang arti dan pentingnya hidup sehat dan akibat penyakit dari melakukan hubungan bebas (free sex).

- a) **Bimbingan yang melibatkan tokoh masyarakat:** Dalam pengertian ini, mengajak segenap masyarakat untuk peduli terhadap anak jalanan, diantaranya melalui tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti RT, RW, Kelurahan atau orang-orang yang bisa mempengaruhi anak ke arah yang lebih baik. Bisa jadi pelibatan tokoh masyarakat dalam bimbingan anak jalanan adalah sebagai langkah bagaimana masyarakat peduli terhadap anak jalanan. Selain itu, tokoh masyarakat digunakan sebagai pengenalan terhadap anak jalanan tentang norma-norma yang kurang dihiraukan.
- b) **Bimbingan yang melibatkan orangtua:** Karena akar permasalahan maraknya anak jalanan tidak terlepas dari campur tangan orangtua. Orangtua disini digunakan sebagai langkah awal untuk mengajak bersama-sama mengentaskan anak jalanan. Bimbingan yang melibatkan orangtua anak jalanan tidak lain adalah sebagai kegiatan Rumah Singgah terhadap pemberdayaan orangtua. Sampai saat ini, ternyata bimbingan

melalui orangtua sedikit banyak mengalami keberhasilan meski belum 100 persen.

- c) **Bimbingan yang melibatkan pihak Kepolisian:** Bimbingan ini lebih ditekankan pada bagaimana sebenarnya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan dilarang kemudian dijelaskan. Selain itu, pelibatan Dinas Kepolisian juga bertujuan agar anak jalanan lebih paham dan mengerti tentang tata tertib di jalanan. Bimbingan dari Dinas Kepolisian tidak hanya memberikan pengenalan tentang peraturan-peraturan jalanan, tetapi juga lebih banyak mengajak anak jalanan untuk tidak terlibat kriminalitas dan belanja untuk obat-obatan terlarang (Narkoba) dan lain-lain.
- d) **Bimbingan yang melibatkan Dinas Kesehatan:** Bimbingan ini lebih ditekankan pada bagaimana mengenalkan anak jalanan tentang bahaya seks dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh adanya pergaulan bebas tersebut. Selain itu, Dinas Kesehatan diajak kerjasama untuk bisa memahamkan anak tentang manfaat kesehatan dan berobat dini.
(Wawancara : Senin-16 April 2012)

Uraian di atas dapat dikatakan, bahwa model pembinaan moralitas anak jalanan yang dilakukan di Rumah Singgah Setara, antara lain: bimbingan perindividu, bimbingan sosial kelompok, bimbingan orangtua, bimbingan melalui guru kelas (guru BK) bagi anak jalanan yang masih sekolah, bimbingan keagamaan dan rekreasi edukasi. Juga, bimbingan yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, orangtua, pihak kepolisian, dinas kesehatan dan lain-lain. Realitas ini lebih padat dari apa yang selama ini diketahui dan terwujud dalam teori. Dengan kata lain, bimbingan moralitas untuk anak jalanan yang selama ini diterapkan Rumah Singgah terangkum dalam bidang-bidang bimbingan personal, sosial, agama, pendidikan, kesehatan dan agama.

Agar program yang diberikan tepat pada sasaran maka pimpinan rumah singgah Setara menjelaskan pembagian kelompok sasaran program pembinaan anak jalanan adalah :

1. Kelompok rentan < 18 tahun
2. Kelompok rawan > 18 tahun

Lebih lanjut ditegaskan, secara prosentase kelompok sasaran lebih banyak di dominasi laki-laki dibanding dengan perempuan, sejumlah 60 % untuk laki-laki dan 40 % untuk perempuan. Sebagai implementasi program yang sekaligus menjadi program unggulannya, rumah singgah ini berinisiatif untuk memberikan ruang bagi anak dalam mendapatkan hak-haknya, terutama dalam mendapatkan pendidikan yang partisipatif dan kreatif. Ruang ini ditata dimana anak mendapatkan stimulasi untuk bereksplorasi ide dan kreasi. Dikatakan Hening Budiawati Pengurus Harian rumah singgah :

" Ide dasarnya adalah the best interest of child, ruang anak ini disediakan untuk kenyamanan, kedamaian anak dalam bermain, belajar dan berdoa ".
(Wawancara : Senin-16 April 2012)

Menurut Esmi Warassih (Sekretaris Yayasan Setara Semarang) :

“Konsep pendidikan untuk anak yang diselenggarakan dikomunitasnya. Setara menyediakan tempat dan konselor bagi anak-anak yang mengadu tentang masalah-masalah yang dihadapi baik disekolah, keluarga atau dalam interaksi dilingkungannya. Setara juga mengajak anak memahami nilai-nilai moralitas, hak-hak dasar dan kewajiban anak, serta patriotisme dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan religi. Didampingi para relawan, proses penggiatan Setara dirangsang untuk partisipatif, beragam, semarak, beretos dan sinambung.

Lebih lanjut ditegaskan Rumah Singgah Setara mempunyai tujuan :

1. Mengisi kesenjangan sistem pendidikan konvensional dengan karakteristik dan kebutuhan anak
2. Memberikan sarana kreasi anak untuk mengembangkan bakat dan potensinya

3. Memberikan tempat untuk kelompok belajar anak-anak
4. Memberikan sarana partisipasi anak-anak dalam keterlibatannya pada proses tumbuh kembang mereka
5. Menyediakan layanan informasi edukatif bagi anak

Terdapat beberapa hasil diskusi yang didapat : bahwa persoalan anak jalanan adalah adanya eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anaknya sendiri diharapkan dapat membantu urusan mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga hal inilah yang menyebabkan anak dalam kondisi terpaksa harus mengenal dunia jalanan, yang didukung dengan adanya pengaruh yang kuat dari teman dijalan dan jarak lokasi rumah tinggal tidak jauh dari jalanan ".

(Wawancara : Senin-16 April 2012)

Sejalan dengan hal tersebut bertitik pada permasalahan tersebut di atas maka rumah singgah Setara menetapkan program kerjanya dengan menitik beratkan pada pemberdayaan anak-anak jalanan melalui pembelajaran (Pendidikan dan ketrampilan).

Gambar III.10.
Foto Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan



Gambar III.11.
Foto Kegiatan Pembelajaran Anak Jalanan



Gambar III.12.
Foto Suasana Kebersamaan Anak Jalanan



Program pembelajaran yang ada di rumah singgah Setara diantaranya : Go back to school, dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan adalah :

1. Melalui pendidikan, meliputi anak-anak jalanan yang putus sekolah dan mau melanjutkan sekolah. Bantuan yang diberikan berupa bea siswa dan pendampingan belajar.
2. Melalui ketrampilan diarahkan pada kelompok usaha produktif.
3. Profesionalisme, pembinaan ini diperuntukkan pada anak yang memiliki bakat seni dan telah dibentuk kelompok grup musik. Kelompok musik ini sudah sering diundang dalam acara resmi seremonial ataupun yang bersifat gebyar santai.

Gambar III.13.
Foto Pembekalan Ketrampilan Anak Jalanan



Lebih lanjut dikatakan Yuli BDN Staf lapangan Rumah Singgah Setara, program tersebut didukung pula dengan beberapa program yang lain diantaranya:

"Program kesehatan bagi anak jalanan secara keseluruhan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyakit virus HfV / AIDS baik bantuan secara medis maupun penyuluhan / ceramah. Ini berlaku bagi anak jalanan itu sendiri, juga keluarganya. Kami akan membina anak jalanan saat anak berusia dibawa 15 tahun, ini akan mempermudah kami dalam pembinaan. Jika sudah besar itu akan mendatangkan kesulitan bagi kami "

(Wawancara : Selasa-1 Mei 2012)

Gambar III.14.
Foto Pemeriksaan Kesehatan Anak Jalanan



Upaya merealisasikan program pembinaan diperlukan pendekatan pendekatan tertentu. Saat melakukan sosialisasi program diperlukan adanya kesepakatan antara anak asuh, orang tua dan pekerja sosial. Komitmen ini dibangun demi kelancaran program dan tujuan pengentasan masalah anak jalanan dapat segera terwujud. Dalam hal ini orang tua diharapkan dapat membantu dan memberi motivasi kepada anaknya supaya rajin mengikuti program pembinaan. Karena jika hal ini tidak dilakukan banyak sekali kendala yang akan ditemui oleh para pekerja sosial. Karena tidak jarang orang tua anak jalanan malah menyuruh dan menuntut anaknya agar setiap hari dapat membantu mengatasi ekonomi keluarga.

Sosialisasi dimasyarakatpun masuk menjadi program utama dalam pembinaan anak jalanan. Karena masyarakat menjadi pengontrol sosial yang baik bagi proses perkembangan pembinaan yang dilakukan. Hal ini dilakukan melalui penampilan

anak jalanan saat show musik diberbagai tempat. Dan menjadi sangat sulit diterima manakala lingkungan sekitar sangat mendukung adanya keberadaan anak untuk dijalan. Jadi tidak heran jika faktor yang mempengaruhi anak untuk di jalanan adalah dari faktor orang tuanya sendiri dan diajak teman karena lokasi rumah tinggal dekat dengan terminal tempat dimana semua orang berkumpul tidak peduli tua maupun muda. Dalam kondisi lingkungan seperti diatas sudah otomatis yang nampak adalah adanya kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak / mempekerjakan anak yang belum waktunya bekerja, dan tidak terlepas dari minum-minuman keras dan narkoba. Hal ini sesuai penjelasan dari salah satu anak binaan yang sudah tidak ngamen lagi karena sudah mendapat binaan namun tapi masih sering mengunjungi teman-temannya. Saat ditanya apa yang menjadi kebutuhanmu ? dengan ringan dijawab Dana selaku anak jalanan

"ya butuh uang..". Harapan mu apa jika ingin mendapatkan uang "pingin kerja enak"

(Wawancara : Selasa-1 Mei 2012)

Situasi sosial yang terjadi di masyarakat sangat memprihatinkan akibat bencana alam sehingga berdatangan para pengungsi dimana-mana, terjadinya pemutusan hubungan kerja alias PHK berakibat pengangguran bagi para orang tua. Kondisi ini semakin terpuruk saat krisis moral dan ekonomi terjadi dan berkepanjangan. Kondisi seperti ini akan berakibat fatal, salah satu kasus : banyak terjadi percekcoakan dalam keluarga karena tidak lagi sang ayah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya akhirnya terjadi perceraian. Akibat lebih jauh banyak lahir anak-anak dijalan untuk mencari keasyikan tersendiri dari pada mendengarkan

percekcokan orang tuanya. Dan masih banyak kasus lainnya yang muncul dari kondisi terpuruk diatas.

Berawal dari permasalahan ini rumah singgah Setara merasa terpanggil selanjutnya berinisiatif mengadakan perluasan wilayah kerja. Perluasan wilayah kerja ini dimulai dengan melirik pada banyaknya anak dijalanan. Diantara kutipan wawancara ini dengan Novi Staff Lapangan rumah singgah Setara :

" Sebagai dampak nyata dari kejadian yang ada yakni jumlah anak jalanan semakin meningkat. Maka program yang dapat memberikan solusi adalah dengan cukup menggunakan kata kunci yakni pemberdayaan bagi anak jalanan sekaligus orang tuanya dan masyarakat sekitar sebagai faktor pendukung yang melingkupi kehidupan dimana anak jalanan berada. Upaya pemberdayaan diperuntukkan bagi anak jalanan yang dibina ".
(Wawancara : Jumat-4 Mei 2012)

Program pembinaan pada rumah singgah Setara terfokus pada program pemberdayaan. Program ini diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan masa depan anak jalanan dengan mengutamakan faktor perbaikan moralitas. Menurut Pimpinan rumah singgah saat ditemui mengatakan, Program ini direliaksikan melalui beberapa pentahapan diantaranya :

1. Open House untuk penyaringan.

Terdapat tempat berkumpulnya anak-anak jalanan dilokasi keramaian. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi rumah singgah Setara untuk melalrukan pendampingan awal yang nantinya akan dilakukan penyaringan terhadap anak yang mau dibina selanjutnya. Tempat pertemuan tersebut merupakan tempat untuk pembinaan yang diperuntukkan bagi anak-anak jalanan tanpa dipungut biaya atau nyewa oleh masyarakat setempat. Upaya penyaringan ini dilakukan

dengan hati-hati tanpa adanya paksaan, yang selanjutnya akan ditempatkan pada PSAA.

2. PSAA (Panti Sosial Asuhan Anak), adalah tempat penampungan dimana setelah dilakukan penyaringan terhadap anak jalanan. Tempat inilah yang akan menentukan selanjutnya anak tersebut rencana diberdayakan pada bidang apa sesuai kondisi kemampuan dan keinginan anak, diantaranya :
 - a. Pendidikan melalui beasiswa dan bimbingan belajar serta pembinaan rohani (berlaku juga untuk orang tua anak jalanan)
 - b. Keterampilan diperuntukkan bagi anak yang sudah tidak sekolah lagi. Diikutkan pelatihan sablon, servis sepeda motor, pertukangan yang selanjutnya dimagangkan ditempat kerja.
 - c. Tempat rujukan bagi pesantren. Anak yang mendapatkan pembinaan di PSAA dengan kategori mengarah pada sifat dan sikap yang baik maka akan diarahkan untuk masuk pada pondok pesantren yang menjadi mitra kerja rumah singgah. Di pondok pesantren tersebut dibina mentalnya dan dilengkapi dengan pendidikan formal yang dibutuhkan.

Rata-rata anak jalanan yang ada di rumah singgah Setara menurut penuturan pengurus harian rumah singgah setara adalah :

" Faktor penyebab anak memutuskan turun kejalan karena faktor ekonomi orang tua sehingga anaknya disuruh oleh orang tuanya membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi yang dominan mempengaruhi anak turun kejalan adalah orang tuanya. Dan ini menjadi lebih mudah memutuskan diri turun ke jalan saat bertemu dengan teman senasib dijalan "

(Wawancara : Selasa-8 Mei 2012)

Lebih lanjut dikatakan :

”Karena lokasi utama / tempat penyangkutan anak ada dilingkungan terminal maka masalah yang cukup dominan pada anak jalanan dirumah singgah Setara adalah kekerasan, eksploitasi, narkoba / ngepil / minum. Jadi persoalan yang berkenaan dengan perhatian orang tua pun sangat kurang”.

(Wawancara : Selasa-8 Mei 2012)

Saat ditemui diantara anak binaannya, Novi staff lapangan rumah singgah Setara mengatakan bahwa faktor utama yang diperlukan adalah "keinginan untuk sekolah".

" Kami menganggap nilai - nilai universal, nilai-nilai ideologi tentang tauhid perlu dan wajib ditanamkan pada anak jalanan karena mayoritas anak jalanan yang ada adalah orang muslim atau beragama Islam. Dan pendekatan yang dikembangkan dirumah singgah ini adalah tidak hanya menggunakan garis ekonomi, pendidikan, kesehatan saja akan tetapi ada yang lebih utama disini yakni membangun nilai-nilai agama. Jadi rumah singgah ini ingin menampakkan sebagai LSM yang bernuansa religius ".

(Wawancara : Kamis-10 Mei 2012)

Faktor-faktor yang membuat anak memutuskan turun ke jalan menurut Yuli BDN, staff lapangan rumah singgah Setara ini adalah :

" Moral dan Mental. Sering kita mendengar penyebab dari semuanya ini adalah karena derasnya arus globalisasi, bagi saya bukan masalah arus globalisasi tapi arus iman yang keropos. Mulai mengalami penurunan iman. Keterpanggilan melayani umat yang tidak ada. Mungkin faktor ekonomi yang dominan dan keluarga / suami istri cerai maka anak broken home. Tapi yang terpenting disini adalah karena faktor struktural dipemerintah yang penannya kurang serius. Sebagai contoh kurangnya lapangan pekerjaan dan tuntutan biaya hidup tinggi.

(Wawancara : Selasa-15 Mei 2012)

3.2.2. Efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah Setara Semarang

Dalam menentukan sebuah program terutama pada masalah pembinaan diperlukan latar belakang yang jelas dari obyek sasaran, sebab program atau layanan yang di realisasikan diharapkan dapat berarti, tepat pada sasaran atau sesuai kebutuhan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kata lain, model pembinaan dikatakan ideal jika program atau layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan anak jalanan. Diantara beberapa hal yang mendasari keberadaan sasaran (anak jalanan) pada pokok persoalan ini adalah :

1. Karakter anak jalanan

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa semakin lama anak menghabiskan waktu dijalanan semakin banyak anak mendapat pengaruh dari luar dan semakin sulit pula untuk diajak pada perubahan yang lebih baik karena sudah melekat pada jiwanya. Kalaupun bisa itupun harus muncul sendiri dari anak tersebut yakni rasa jenuh dan capek hidup dijalan sehingga sedikit dapat membantu proses pembinaan yang dilakukan walau itu tetap tidak mudah, tidak cepat dan semuanya butuh proses. Kesulitan persoalan penanganan anak jalanan diatas karena faktor lamanya berada di jalan adalah adanya berbagai macam pengaruh buruk yang diterimanya. Diantaranya berbagai prilaku buruk contoh perkataan jorok, perlaku mengkonsumsi rokok, minuman keras, ngelem, narkoba dan sejenisnya. Berikut ungkapan Yudha, salah satu anak jalanan :

"Hampir semua anak jalanan pasti mengkonsumsi rokok, dan pernah merasakan minum, ngelem dan ngepil".
(Wawancara : Jumat-18 Mei 2012)

Persoalan inipun perlu dicermati dalam upaya mencari solusi penanganan pembinaan anak jalanan. Karakteristik anak jalanan juga diwarnai oleh beberapa budaya yang secara tidak disadari telah diterapkan dalam kehidupan sehari - hari. Kebiasaan-kebiasaan ini juga patut dicermati sebagai tambahan pertimbangan dalam menentukan segala macam solusi dalam upaya pembinaan terhadap masalah anak jalanan. Diantara budaya tersebut adalah jika mempunyai uang hari ini sedikit ataupun besar jumlahnya tetap akan dihabiskan dalam sesaat / hari ini pula. Untuk keesokan hari keyakinan orang tua dan anak jalanan : .. pasti ada uang ditangan " selanjutnya dihabiskan pula dalam tempo sesaat, dan begitu pula seterusnya.

Tanpa ada istilah " menabung, apalagi memikirkan tentang, Esok masih ada hari yang perlu difikirkan untuk melangkah kedepan ., Lebih parah lagi ada budaya yang membiasakan anak jalanan untuk hidup ketergantungan pada orang lain yakni kebiasaan " hutang ", pikiran mereka. Jika tidak hutang, seolah-olah hidup ini tidak ada gairah untuk kerja ". Diantara hasil wawancara dari informan hanya ada 8 anak yang berniat menabung, selebihnya menghabiskan uang dalam tempo sesaat.

Budaya sok pamer, ikut-ikutan dan saling olok. Budaya ini muncul saat ada salah satu anak jalanan yang mempunyai suatu barang bahkan pacar baru maka akan dipamerkan kepada teman-temannya, walau barang tersebut kategori

barang yang belum lunas alias kredit. Hal ini membuat teman temannya iri dan mungkin minder bagi temannya yang kurang mampu atau yang tidak dapat mengakses fasilitas pengkreditan yang ada karena sistem yang dipakai menggunakan sistem rentenir yakni membayar dengan pengembalian yang berlipat. Sehingga anak jalanan yang minder tersebut akan berjuang semaksimal mungkin apapun caranya hingga ia dapat menyamai bahkan menyaingi temannya yang pamer tersebut walau dia akan dihadapkan pada kehidupan yang lebih mencekik karena harus membayar pengembalian hutang yang berlipat. Budaya ikut-ikutan ini tidak hanya sekedar pada kasus pembelian baju saja atau merokok akan tetapi sampai pada masalah minum-minuman keras, narkoba dengan segala macam jenisnya serta pada masalah penentuan seorang pendamping hidup. Misalnya pada kasus minum saat seorang anak datang untuk bertamu maka jemuannya adalah minuman keras, jika tidak mau minum maka dikatakan sombong, menghina tidak gaul, banci dan tidak jantan serta dianggap tidak mau berteman. Sedangkan pada persoalan menentukan pendamping hidup jika anak jalanan belum mempunyai calon pasangan maka akan diolok-olok katanya tidak laku, banci, tidak jantan, dan masih banyak olok-olokan yang lainnya yang lebih keras.

Sehingga lawan bicaranya pun akan berbuat sesuatu dan menunjukkan bahwa dia tidak seperti apa yang disebut oleh temannya. Parahnya jika anak jalanan tersebut asal-asalan tanpa pikir panjang mencari dan mendapatkan calon pasangannya dengan apa adanya atau dengan kata lain siapa saja asal perempuan.

Hubungan seperti ini tidak akan bertahan lama atau bahkan gagal sebelum menikah, lebih buruk lagi pasangan tersebut hanya iseng dan melakukan hubungan diluar nikah. Persoalan ini terjadi bisa berawal dari budaya yang menganggap bahwa jika belum pernah menggauli seorang perempuan maka dikatakan tidak jantan atau banci.

Masih banyak budaya yang lainnya yang tumbuh dan secara tidak sengaja diciptakan serta berlaku pada kehidupan keseharian yang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, wajar atau semestinya. Walau oleh orang - orang yang berada dalam kehidupan wajar menganggap bahwa budaya tersebut adalah budaya yang tumbuh pada masyarakat pinggiran, kelas rendah yang tidak berpendidikan dan lain sebagainya.

Semua dari gambaran diatas merupakan hal-hal penting tentang latar belakang keberadaan anak jalanan yang patut dipertimbangkan dalam menentukan langkah pemberian layanan yang sesuai dengan kondisi dan nantinya akan disesuaikan pula dengan kebutuhan dan harapan dari anak jalanan itu sendiri.

2. Penyebab dan yang mempengaruhi anak turun ke jalan

Diketahui dari informan yang ada terdapat faktor penyebab anak turun ke jalan diantaranya faktor ekonomi orang tua.

Berikut cuplikan Nardi dari salah satu anak jalanan:

" Awalnya aku punya masalah dengan saudara akhirnya aku memutuskan diri untuk minggat akhirnya sampai ke terminal Terboyo. Karena tidak punya uang untuk makan akhirnya aku diajak ngamen oleh teman yang baru aku kenal di terminal Terboyo. Dan selanjutnya ada perasaan ingin pulang tapi sesampai dirumah malah bapak sudah tidak bekerja lagi sebagai sopir truk dan malah menuntut aku untuk membantu membayar rekening rumah. Akhirnya aku sering cek-cok sama bapak dan mulai saat itu pun aku sudah jarang pulang dan memutuskan diri ngamen. Sebetulnya cek-cok dengan bapak sering terjadi karena berangkat dari kebutuhan keluarga yang semakin banyak dan tak dapat terpenuhi. ".
(Wawancara : Minggu-20 Mei 2012)

Saat ditanya apa nggak bosan hidup dijalan terus, dan apa akan selamanya hidup dijalan ? :

"Ah ya nggak lah, sebetulnya aku sudah capek dijalan. Aku dijalan sudah sekitar 6 -7 tahun, tapi bagaimana aku akan kerja aku tidak punya keahlian hanya nyanyi, dan sekolah ku hanya sampai tamat SMP. Sebetulnya sih enak ngamen sebentar nyanyi sudah dapat sekitar Rp 80.000 - Rp 115.000 *.
(Wawancara : Minggu-20 Mei 2012)

Program pembinaan bagi anak jalanan bagi rumah singgah Setara sudah lama berlangsung Program ini diawali dengan memikirkan nasib para pekerja anak, untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup termasuk biaya pendidikan bagi dirinya. Program pembinaan waktu itu berkisar pada program pendidikan dengan memberi beasiswa bagi mereka yang sekolah, sekaligus membantu pendampingan belajar dan memberi pembinaan rohani serta jasmani yang semua kegiatan tersebut sifatnya berkala seminggu dua kali.

3.3. Hasil

3.3.1. Peran rumah singgah Setara dalam mendukung kebijakan pendampingan anak jalanan di Kota Semarang.

Setelah mengetahui segala karakter dan kebiasaan anak jalanan, perlu dan sangat penting pula mengetahui kebutuhan dan harapan dari anak jalanan dalam menentukan program kunci pembinaan. Berikut kutipan wawancara dengan Esmi Warassih sekretaris rumah singgah Setara :

Akan sangat "muspro" atau percuma saat menentukan sebuah program tanpa mengetahui kebutuhan dan harapan dari sasarannya. Dan ini sifatnya pun bukan perkiraan dari para pekerja sosial akan tetapi betul-betul di gali dari kebutuhan dan harapan dari sasaran yakni anak jalanan. Sehingga program diharapkan dapat mengandung nilai dan berarti bagi sasaran, karena sesuai kebutuhan dan harapannya.

(Wawancara : Senin-21 Mei 2012)

Diantara program yang perlu dipersiapkan adalah dengan menyiapkan mental yakni persiapan peralihan profesi dari ngamen ke arah manusia yang mempunyai skill. Maksudnya bahwa saat pekerjaannya adalah pengamen tanpa mempunyai keahlian pun bisa mendapatkan uang dengan mudah, namun jika beralih profesi yang menuntut keahlian maka diperlukan persiapan diri belajar' berlatih dan kerja keras agar mempunyai ketrampilan. Semua ini berproses perlu waktu untuk memandirikan mereka berangkat dari latar belakang dia sebagai anak jalanan yang sarat dengan pengaruh yang cukup kuat dan juga dari sifat malas diharapkan punya semangat untuk merubah diri ke manusia yang punya potensi. Sehingga diperlukan solusi yang menyeluruh dan terangkai tidak bisa terputus. Dan saat menunggu masa mandiri diperlukan pula hal-hal tertentu yang perlu dipikirkan, salah satunya bisa berangkat

dari kebutuhan sehari-harinya yang terhambat atau tidak dapat terpenuhi karena si anak dalam kondisi belajar ketrampilan. Apalagi si anak jalanan juga merasa punya kewajiban membantu ekonomi keluarga maka kesulitanpun akan nampak, sehingga diperlukan solusi : bagaimana proses memandirikan anak tidak terganggu dengan hal-hal tersebut ?. Diharapkan dari semuanya ini akan mendapatkan solusi pembinaan yang ideal bagi anak jalanan.

Jika membalas program tidak terlepas dari unsur manajemen. Karena program adalah wujud implementasi dari manajemen. Secara garis besar diantara unsur manajemen terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi. Sebagai program inti rumah singgah adalah pembinaan maka jelas tidak terlepas dari unsur perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi. Berhasil tidaknya sebuah program pelayanan terhadap anak jalanan melalui rumah singgah tergantung dari bagaimana mengatur manajemen atau pengelolaan rumah singgah tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan Esmi Warasih sekretaris rumah singgah

Setara :

" Di rumah singgah kami manajemen yang kami gunakan adalah manajemen terbuka dan bersifat partisipatif. Open manajemen ini maksudnya semua tahu semua, dari unsur perencanaan yang terbuka saat kita merancang sebuah program biasanya adalah dalam forum rapat kerja. Dan pengorganisasian adalah prinsip yang harus kami terapkan karena dengan pengorganisasian semua orang tahu tugasnya masing-masing. Pengendalian jelas kami butuhkan disini karena menjaga organisasi kami agar tetap pada jalurnya untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan organisasi kami. Evaluasi yang kami lakukan adalah evaluasi program dan evaluasi pendampingan, dan ini sifatnya rutinitas. Bersifat partisipatif disini semua unsur yang ada pada organisasi kami diharapkan dapat bersifat partisipatif.

(Wawancara : Senin-21 Mei 2012)

Baik mulai dari jajaran kepengurusan paling atas sampai paling bawah termasuk sasaran binaan yakni anak jalanan. Sasaran binaan ini unsur partisipatifnya saat penentuan sebuah program berangkat dari kebutuhannya dan saat mengevaluasi sebuah program untuk mengetahui sampai dimana program layanan yang kami berikan sudah tepat sasaran apa belum. Hal ini kami butuhkan karena keberhasilan program yang ada jelas berangkat dari unsw partisipasinya dari semua pihak termasuk anak jalanan sebagai sasaran binaan".

(Wawancara : Senin-21 Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sebuah organisasi yang baik dalam hal ini rumah singgah, dapat dijadikan patokan dalam penentuan layanan pembinaan yang ideal bagi anak jalanan.

Model pembinaan yang ideal dapat terwujud jika memperhatikan beberapa hal diatas yakni :

1. Kapasitas rumah singgah
2. Profil anak yang akan di bina
3. Fasilitas rumah singgah
4. Sistem pendanaan rumah singgah
5. Manajemen rumah singgah

Semuanya ini terangkai menjadi satu rangkaian yang tak terpisah dan saling terkait. Pertama yang perlu diperhatikan adalah kapasitas dari rumah singgah yang ada. Baik berkenaan dengan unsur jumlah secara umum sasaran binaan, jumlah sasaran binaan berdasarkan jenis kelamin dan juga berdasarkan usia. Keberadaan sasaran ini jelas berkaitan erat dengan kondisi rumah singgah dan kondisi jumlah pendamping atau pekerja a sosial beserta kesesuaian job kerjanya yang erat dengan kualitas SDM yang ada. Dengan kata lain adanya volume pekerjaan yang dapat

dilakukan. Nampak dalam satu unsur ini saja terdapat rangkaian yang cukup kuat dan tak dapat terpisah saling terkait. Kedua terdapat hal - hal tertentu yang perlu difahami berkenaan dengan keberadaan sasaran binaan. Menjadi faktor yang cukup mendasar karena program dapat dikatakan berhasil jika apa yang diberikan atau menjadi layanan dapat berarti atau bermakna bagi obyek sasaran dari program tersebut.

Demikian pula dengan fasilitas rumah singgah, jika fasilitas yang ada dapat menjawab segala kebutuhan anak jalanan dari permasalahan yang terjadi, maka keberhasilanlah yang akan dicapai dalam program tersebut. Dan ini jelas tidak terlepas dari keempat unsur di atas yang mendukung fasilitas yang dibutuhkan. Yakni dari unsur kapasitas, sistem pendanaan, manajemen rumah singgah yang lengkap dengan kualitas SDM pekerja sosial dalam menangani permasalahan yang menjadi kebutuhan mendasar anak jalanan dalam mencari solusi permasalahan yang ada.

Sistem pendanaan menjadi faktor terpenting pula dalam upaya merealisasikan segala kebutuhan program, yakni menyangkut kapasitas yang ditangani, baik berhubungan dengan jumlah sasaran maupun persoalan yang ditangani. Semuanya ini dapat berhasil berjalan sesuai dengan tujuan dan target program jika terdapat sistem pengelolaan rumah singgah yang baik.

3.3.2. Bentuk-bentuk pendampingan anak jalanan yang dilakukan oleh rumah singgah Setara Semarang

Pelayanan rumah singgah Setara dalam menangani anak jalanan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana pedoman yang ditetapkan oleh

Pemerintah. Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap peran dan kinerja para petugas pengelola rumah singgah. Berikut secara kronologis dikemukakan beberapa tahapan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah singgah Setara Semarang yang menjadi lokasi penelitian.

1. Tahap Penjangkauan

Substansi kegiatan penjangkauan adalah kegiatan kunjungan yang dilakukan para pekerja sosial rumah singgah ke jalanan untuk menjangkau anak-anak jalanan sebagai upaya untuk menciptakan kontak awal atau pendahuluan dan persahabatan dengan anak jalanan. Pada umumnya rumah singgah yang menjadi lokasi penelitian melaksanakan kegiatan penjangkauan sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu dengan rentang waktu pagi, siang maupun sore hari.

2. Tahap Identifikasi dan Pengungkapan Masalah (*Problem Assesment*).

Substansi tahapan kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan para pekerja sosial rumah singgah dalam menginventarisasi dan mengkaji identitas anak, riwayat hidup anak beserta keluarganya, permasalahannya, maupun potensi beserta kebutuhan dalam penanganannya secara cermat dan teliti. Anak jalanan yang sudah dikenal selanjutnya dimotifasi untuk datang kerumah singgah dengan menggunakan pendekatan kelompok guna menarik lebih banyak anak jalanan yang datang. Kegiatan ini juga dilakukan dikantong-kantong anak jalanan ataupun dirumah singgah dengan tujuan untuk mengisi file dokumen anak yang selanjutnya digunakan untuk merencanakan kegiatan penanganannya.

3. Tahap Resosialisasi

Tahap resosialisasi merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan para pekerja sosial rumah singgah dalam merubah sikap dan perilaku anak jalanan agar sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat pada umumnya. Pada proses tahapan ini anak-anak jalanan memperoleh informasi dan pengertian tentang etika, norma dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki sikap maupun perilaku anak agar sesuai dengan norma sosial baik terhadap diri sendiri, teman, keluarga serta lingkungan disekitar tempat tinggal mereka dimana perubahan tersebut diharapkan munculnya dari kesadaran anak. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi bimbingan motivasi, bimbingan sikap mental/spiritual serta kesadaran dalam mematuhi berbagai aturan atau norma hidup bermasyarakat. Berbagai kegiatan tersebut menarik perhatian anak dan sangat efektif mengurangi waktu anak untuk berada di jalanan, sehingga kebiasaan untuk bermain di jalanan dan hanya berorientasi pada uang, sudah mulai menampakkan adanya perubahan. Kalau sebelum ini mereka selalu berada di jalan dengan motif utama mencari uang untuk bermain, jajan atau kebutuhan konsumtif lainnya, maka sekarang mereka mulai beralih ke rumah singgah yang berarti frekuensi kegiatan di jalan sudah mulai berkurang.

4. Tahap Pemberdayaan

Tahapan kegiatan dimana para petugas atau pekerja sosial rumah singgah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelayanan anak sekaligus mendorong anak untuk mendayagunakannya. Selanjutnya para pekerja rumah singgah

menghubungi sumber-sumber rujukan yang diperlukan dan membuat kesepakatan dengan sistem sumber tersebut guna menindaklanjuti penanganan lanjutan anak. Kegiatan pemberdayaan anak-anak pada umumnya diorientasikan pada kegiatan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan/bakat, minat serta kebutuhan anak yang mengalami putus sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini agar anak memiliki ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam mencari nafkah tanpa harus beraktifitas turun kejalan.

5. Tahap Pengakhiran Pelayanan (Terminasi)

Pada hakekatnya kegiatan terminasi merupakan kegiatan menghentikan proses pelayanan bagi anak jalanan dikarenakan anak telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tahapan akhir pelayanan merekomendasikan anak untuk dirujuk ke lembaga lain karena rumah singgah tidak menyediakan jenis pelayanan lanjutan yang dibutuhkan anak jalanan. Kegiatan pengakhiran pelayanan dilakukan apabila anak binaan telah mencapai kondisi-kondisi berikut ini :

- a. Anak mandiri atau telah aktif bekerja/produktif
- b. Anak kembali kepada orang tua
- c. Dirujuk ke Panti Sosial/asuhan atau ke lembaga pengganti lain
- d. Anak kembali ke sekolah
- e. Adanya peningkatan pendapatan atau kesejahteraan pada orang tuanya.

Untuk dapat mengetahui keadaan tersebut maka para pekerja sosial rumah singgah melakukan pemantauan atau supervisi melalui kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kunjungan ke rumah (home visite) kepada mereka yang pulang kepada keluarga
- b. Melakukan pemantauan kepada anak binaan yang alih kerja
Rujukan ke Panti Sosial yang belum menemukan alternatif yang sesuai.

Rumah singgah Setara yang menjadi sasaran penelitian ini dikelola oleh yayasan Setara yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh para pengurusnya, yayasan Setara memberikan pelayanan social sebagai wujud komitmen serta kepedulian mereka untuk membantu anak-anak jalanan kearah terwujudnya kesadaran, kepedulian dan dukungan terhadap program penanganan permasalahan sosial anak jalanan di kawasan Kota Semarang. Dengan melakukan kegiatan pendampingan, yayasan Setara ini berupaya untuk mengurangi aktivitas anak di jalanan serta membantu mereka dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial anak secara positif melalui perubahan sikap mental dan perilakunya didalam lingkungan sosial keluarga serta masyarakat disekelilingnya. Namun demikian dalam implementasinya masih banyak pencapaian tujuan program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang berhadapan dengan berbagai kendala dan hambatan yang ditemui dilapangan.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang sering terjadi adanya stigma masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap keberadaan anak jalanan. Selain itu operasional lapangan untuk program pendampingan kondisi rumah singgah hanya dilengkapi dengan sepeda motor, walaupun ada yang memiliki mobil itu hanya sebagian kecil. Anak jalanan yang

dibina dirumah singgah. Setara jumlahnya sebagian besar adalah anak laki-laki dan semuanya tidak menetap dirumah singgah, mayoritas dari anak jalanan tersebut sifatnya hanya mampir / singgah secara rutin atau berkala sesuai program dan mengikuti kehendak hati anak tersebut tergantung dari kedekatan para pendamping dalam melakukan pembinaan, sehingga kedekatan ini yang akan menentukan anak jalanan tertarik atau tidak dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan dirumah singgah. Walau pengertian rumah singgah dalam hal ini bukanlah untuk tempat tinggal, tapi merupakan tempat dimana pembinaan itu dilaksanakan.

Penciptaan suasana kekeluargaan bertujuan agar anak jalanan dapat kembali menemukan konsep keluarga dimana untuk sebagian besar diantaranya tidak lagi dapat dipenuhi. Dengan keadaan ini, maka konsentrasi terbesar pekerjaan pekerja sosial adalah memperhatikan dan berhubungan dengan anak jalanan. Disamping bekerja dirumah singgah, para pekerja sosial tetap berkunjung ke jalanan. Hal ini memungkinkan anak jalanan secara berangsur-angsur akan menemukan situasi lain melalui rumah singgah. Mereka datang kapan saja baik pagi, siang, bahkan tengah malam dan pekerja sosial berkewajiban melayaninya. Anak yang jarang datang dikunjungi pekerja sosial di jalanan. Semua anak jalanan yang mangkal pada kantong anak jalanan pada kenyataannya tidak semuanya akan datang ke rumah singgah. Ketertarikan anak jalanan pada kegiatan-kegiatan dan hubungan persahabatan yang intim dengan pekerja sosial akan menjadi titik awal bagi proses penanganan masalah dan komunikasi lebih lanjut dengan anak. Anak jalanan yang rutin datang bahkan yang menetap di rumah singgah secara intensif akan memperoleh pelayanan.

Sebaliknya anak yang hubungannya jarang akan kurang intensif sehingga berakibat proses perubahannya akan memakan waktu yang relatif lama. Rumah singgah akan menjadi saringan (filter) bagi anak untuk menampilkan perilaku yang normatif.

Melalui gambaran sehari-hari fenomena di rumah singgah selanjutnya rumah singgah bagi kelompok anak jalanan memiliki fungsi-fungsi, antara lain merupakan:

1. Tempat Pertemuan (Meeting Point)

Rumah singgah merupakan tempat bertemunya antara pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan dan melakukan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan rumah singgah.

2. Pusat Assesment dan Rujukan

Menjadi tempat untuk melakukan assesment atau diagnosis terhadap berbagai kebutuhan dan masalah anak jalanan serta melakukan rujukan (referral) pelayanan sosial bagi anak jalanan yang menjadi binaannya.

3. Fungsi Fasilitator

Rumah singgah merupakan media perantara atau fasilitator antara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti maupun lembaga-lembaga lainnya. Anak jalanan diharapkan tidak terus-menerus bergantung kepada Rumah Singgah, melainkan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui atau setelah proses pelayanan Rumah Singgah.

4. Fungsi Perlindungan

Rumah Singgah dipandang sebagai tempat berlindung dari tindak kekerasan maupun tindakan eksploitasi lainnya terhadap anak dijalan.

5. Pusat Informasi

Rumah Singgah menyediakan informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan, seperti : data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, bantuan sosial, kursus ketrampilan dan lain sebagainya.

6. Kuratif-Rehabilitatif

Dalam fungsi ini Rumah Singgah mampu mengatasi permasalahan sosial anak jalanan melalui upaya merubah sikap dan perilaku anak yang pada akhirnya akan mampu mengembalikan serta menanamkan fungsi sosial anak. Intervensi profesional dilakukan termasuk menggunakan tenaga konselor yang sesuai dengan masalah yang dialami anak.

7. Akses terhadap Pelayanan

Sebagai tempat persinggahan, rumah singgah menyediakan akses terhadap berbagai pelayanan sosial bagi anak jalanan. Untuk itu peran petugas dan para pekerja sosial di rumah singgah akan membantu anak untuk mencapai pelayanan tersebut.

8. Re-Sosialisasi

Sebagai upaya untuk mengenalkan kembali norma, situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan, oleh karenanya lokasi rumah singgah berada ditengah lingkungan masyarakat. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan.

3.4. Dampak

Beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian bersama sehubungan dengan dicapainya indikator positif maupun negatif dari kinerja dampak (impact), yakni adanya sasaran kinerja yang memberikan pengaruh yang lebih luas pada tingkatan indikator dampak berdasarkan asumsi yang telah diterapkan. Dilihat dari aspek kinerja menunjukkan belum optimalnya tingkat kemampuan ataupun kapabilitas para petugas rumah singgah dalam memahami prosedur pelayanan maupun pemahaman profesi pekerjaan sosial hingga membawa dampak pada pencapaian kinerja pelayanan. Hal ini tampak dari berbagai kendala yang dihadapi para petugas dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pelayanan dirumah singgah, sehingga menurut pengamatan dipandang belum dapat mewujudkan fungsi-fungsi rumah singgah secara optimal. Pada hakekatnya studi implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu kebijakan publik serta mengkaji secara kritis dan evaluatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut (Effendi, 2000). Selanjutnya efektivitas kebijakan antara lain bisa dilihat dari proses implementasi yaitu menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program atau kebijakan dengan policy guidelines yang merupakan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan kebijakan yang pada hakekatnya mencakup evaluasi kinerja yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang meliputi antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan pemanfaatan kebijakan (Dwiyanto, 1999 : 1). Sejalan dengan berkembangnya era kualitas pelayanan, pemerintah merasa perlu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

sebagai salah satu upaya perwujudan tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, yaitu sebagai penyelenggara pelayanan publik. Untuk kepentingan tersebut pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara mengeluarkan peraturan yang mengatur pelayanan publik yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor /KEP/MENPAN/7/2003 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa hakekat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat didalam Keputusan Menteri PAN Nomor 63 tahun 2003 dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) prinsip pelayanan publik, antara lain :

1. Kesederhanaan, yakni prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan, dalam hal (a) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik (b) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3. Kepastian waktu, dimana pelaksanaan pelayanan publik diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, dalam arti produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, perlu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan sarana pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses, diperlukan tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, prinsip dimana memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan, kondisi lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti toilet, tempat ibadah, parkir, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Warella (1997) mengemukakan bahwa aparaturnya telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan pelayanannya pada masyarakat mulai dari membenahan dibidang struktur dan fungsi, sistem dan prosedur, penyediaan sarana yang lebih memadai, adanya reward and

punishment, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, peningkatan profesionalisme dan kesediaan aparat untuk menerima umpan balik dari masyarakat tentang pelayanan yang mereka peroleh. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa komponen pelayanan yang ditemui dirumah singgah belum dapat diwujudkan secara optimal oleh para petugas pengelola sebagai aparat penyedia pelayanan terhadap anak-anak jalanan sebagai pihak pengguna manfaat dan pelayanan (beneficiaries).

Belum terwujudnya kemudahan akses bagi ruma-rumah singgah mengingat keberadaannya dilokasi yang relatif agak jauh dari kantong aktifitas anak-anak jalanan yang menjadi warga binaannya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pelayanan publik belum sepenuhnya menjangkau kepentingan pengguna manfaat. Dilain pihak kondisi lingkungan (kerja) rumah singgah relatif belum menunjang terwujudnya kenyamanan bagi warga binaan (anak-anak jalanan) untuk singgah dan menerima pelayanan dari petugas, mengingat keterbatasan kepemilikan rumah singgah dalam menyediakan kelengkapan sarana maupun prasarana serta fasilitas pelayanan. Menurut Robert C.Mill (dalam A.Dale Timpe, 2000 : 3) bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan/representatif menjadi kunci pendorong atau salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja bagi petugas untuk menghasilkan kinerja puncak.

Selanjutnya ditambahkan pula oleh Timpe bahwa lingkungan kerja atau suasana organisasi adalah serangkaian sifat yang dapat diukur berdasarkan persepsi

kolektif dari orang-orang yang hidup dan bekerja didalam lingkungan tersebut, dan diperlihatkan untuk mempengaruhi motivasi serta perilaku mereka. Namun demikian performansi kerja atau kinerja yang ditunjukkan oleh para petugas rumah singgah dengan sikap penuh pengabdian, kedisiplinan dan keikhlasan disertai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial terhadap anak-anak jalanan mengindikasikan bahwa para petugas memiliki motivasi yang relatif tinggi walaupun didukung oleh kemampuan teknis yang relatif terbatas terlebih bagi petugas rumah singgah yang mengabdikan dirinya dengan motivasi ibadah atas dasar rasa ikhlas dan sukarela semata. Hal ini sesuai dengan analisis kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Faustino Cardoso Gomes (2001:177), bahwa analisis performansi kinerja berkaitan erat dengan 2 (dua) faktor utama yaitu adanya motivasi dan kemampuan seseorang untuk bekerja, yang selanjutnya menimbulkan kemampuan untuk melaksanakannya.

Pendapat serupa diungkapkan pula oleh Keith Davis (dalam Mangkunegoro, 1999 : 67) bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dirumuskan sebagai interaksi antara faktor kemampuan dan faktor motivasi ($\text{Human Performance} = \text{Ability} + \text{Motivation}$). Dengan demikian tingkatan hasil kerja yang telah dicapai para petugas rumah singgah dalam mewujudkan fungsi rumah singgah telah memenuhi sebagaimana prosedur yang digariskan oleh pemerintah. Menurut Henry Simamora (2001 : 415) bahwa kinerja akan dicapai apabila para petugas dapat mewujudkan hasil kerjanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, yaitu terpenuhinya seluruh rangkaian atau tahapan pelayanan

rumah singgah yang diawali dari tahap penjangkauan lapangan (reach out) hingga tahap pengakhiran atau pemutusan hubungan pelayanan (termination). Para pengelola rumah singgah secara konsisten telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanannya dengan berpedoman pada *guide lines*. Atau pedoman penanganan anak jalanan yang telah digariskan Pemerintah dalam rangka mengurangi beban permasalahan sosial Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategisnya (Renstra).

The Liang Gie (1982) menambahkan bahwa disamping faktor motivasi kerja, kemampuan kerja dan lingkungan kerja, faktor lain yang ikut mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja adalah prosedur kerja yang pada kondisi rumah singgah dituangkan melalui pedoman pelaksanaan tugas pelayanan dan perlengkapan atau sarana/fasilitas kerja serta terwujudnya suasana kerja yang harmonis. Walaupun ketiga rumah singgah yang menjadi lokasi penelitian belum didukung tersedianya sarana perlengkapan kerja yang memadai, namun suasana kerja telah terbangun dengan harmonis dan kondusif baik antar para petugas maupun antara petugas dengan para warga binaannya. Dalam sebuah keluarga, hubungan yang terjadi bersifat informal dimana satu dengan lainnya bersikap saling mengasihi dan memperhatikan.

Menurut Bernandin dan Russel (2001 : 135) bahwa kinerja atau performansi merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian kinerja rumah singgah akan dapat dicapai secara optimal apabila para petugas pengelolanya dapat melaksanakan keseluruhan tahapan pelayanan rumah singgah sebagaimana yang telah digariskan pemerintah didalam

ketentuan/pedoman pelayanan rumah singgah anak jalanan atau memberikan pelayanan anak jalanan melalui fasilitasi rumah singgah serta mampu mewujudkan fungsi rumah singgah secara optimal, sehingga akan menghasilkan indikator output berupa produk aktivitas pelayanan secara optimal. Walaupun demikian secara keseluruhan catatan indikator kinerja (input, output, outcome, benefit, dan impact) yang dicapai para petugas pengelola belum mampu mewujudkan fungsi rumah singgah secara optimal sebagaimana diungkapkan para informan dalam analisis hasil penelitian di bab depan dalam penulisan ini. Namun demikian kita sadari bersama bahwa permasalahan sosial tidak akan pernah terselesaikan atau hilang dari peradaban manusia. Di negara Indonesia permasalahan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk didalamnya adalah permasalahan sosial anak jalanan.

Adanya pelayanan sosial rumah singgah anak jalanan merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi publik pemerintah perlu mengubah paradigma pelayanan publiknya agar lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Untuk itu dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat diperlukan prinsip-prinsip pelayanan pada sektor publik yang perlu dikembangkan oleh rumah singgah (yang diselenggarakan masyarakat) dan selama ini dibina pemerintah, sebagaimana dikemukakan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia/SANKRI (dalam Soeprapto, 2003 : 17) antara lain : Menetapkan standar pelayanan, baik menyangkut standar atas produk pelayanan maupun standar prosedur

dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan yang berkualitas, dimana standar pelayanan akan menunjukkan adanya kepastian dan kejelasan kinerja pelayanan. Terbuka terhadap segala kritik dan saran maupun keluhan beserta kejelasan informasi yang diperlukan dalam pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan harus memiliki berbagai instrumen yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, kritik maupun saran dan memberikan kejelasan informasi secara pro aktif. Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan dengan menggunakan sumber-sumber daya (resources) untuk melayani masyarakat sesuai dengan kriteria dasar pelayanan publik yakni efektif dan efisien serta ekonomis.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang ditemui dalam penelitian seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Input, terdiri dari unsur sumber daya pendukung dan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya pendukung yang diperlukan pembinaan anak jalanan di rumah singgah Setara tergolong baik. Sumber daya manusia yang ada di Rumah Singgah Setara Semarang sangat berkompeten dalam pembinaan anak jalanan sehingga mendukung terlaksananya kebijakan pembinaan anak jalanan
2. Proses, terdiri dari kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pembinaan anak jalan dan efektivitas serta efesiensi dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah Setara Semarang. Rumah singgah Setara menetapkan program kerjanya dengan menitik beratkan pada pemberdayaan anak-anak jalanan melalui pembelajaran (Pendidikan dan ketrampilan). Pola penanganan anak jalanan menunjukkan adanya pemahaman dan kapabilitas para petugas rumah singgah dalam mewujudkan fungsi rumah singgah secara komprehensif dan optimal sehingga dapat menunjang aktifitas positif anak, yang pada akhirnya dapat mengurangi aktivitas anak turun kejalan.

3. Outputs (Hasil) pengamatan dilapangan dapat dijelaskan bahwa pada hakekatnya tahapan-tahapan kegiatan pelayanan telah mewujudkan berfungsinya rumah singgah. Hanya saja intensitas capaiannya belum optimal, namun sejauh kondisi memungkinkan karena terbatasnya sumber dana, sumber daya manusia maupun sarana mobilitas yang dimiliki rumah singgah.
4. Outcomes (Dampak), beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian bersama sehubungan dengan dicapainya indikator positif maupun negatif dari kinerja dampak (outcomes), yakni adanya sasaran kinerja yang memberikan pengaruh yang lebih luas pada tingkatan indikator dampak berdasarkan asumsi yang telah diterapkan. Dilihat dari aspek kinerja menunjukkan belum optimalnya tingkat kemampuan ataupun kapabilitas para petugas rumah singgah dalam memahami prosedur pelayanan maupun pemahaman profesi pekerjaan sosial hingga membawa dampak pada pencapaian kinerja pelayanan. Hal ini tampak dari berbagai kendala yang dihadapi para petugas dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pelayanan dirumah singgah, sehingga menurut pengamatan dipandang belum dapat mewujudkan fungsi-fungsi rumah singgah secara optimal.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan inputs diperlukan penguatan komitmen dari pihak manajemen rumah singgah Setara Semarang. Peningkatan komitmen dilakukan melalui penyediaan ruang yang representatif. Sarana kelas yang telah memenuhi standar adalah meja/kursi, lemari, projector, layar OHP, LCD, jam dinding,

mimbar, alat tulis menulis (ATK), Papan tulis, mesin pendingin (AC). Adapun sarana kelas yang belum memenuhi standar adalah: papan tulis, Flip Chart, TV & CD Player, alat perekam (Recarder), komputer, saftura komunikasi intemal (interkom). Pihak manajemen hendaknya dalam menata ruang dan sarana-sarananya menggunakan jasa profesional dibidangnya. Untuk Pemeliharaan gedung-gedung, hendaknya dibuat schedule rutin bagi petugas, motivasi para pelaksana, serta pengawasan.

2. Untuk meningkatkan proses, petugas pengelola rumah singgah diharapkan mampu mengembangkan sistem jaringan kerja (network) dan kemitraan (relationships) secara optimal, karena penguatan jaringan memiliki makna bahwa para pefugas pengelola mengetahui bagaimana menggunakan dan mampu mengakses sumber-sumber potensi yang ada secara optimal untuk kepentingan peningkatan dan pengembangan rumah singgah.
3. Untuk meningkatkan Outputs (Hasil), hendaknya rumah singgah Setara Semarang, selalu lebih aktif dalam memberikan pembinaan moral bagi anak jalanan, dan tidak mudah menyerah meski banyak menemukan kendala dan kurangnya dukungan masyarakat. Posisikan hal ini, sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa, negara dan agama. Jangan meragukan hal yang baik dan pasti menemukan jalan keluar dan setiap kesulitan-kesulitan yang dialami Rumah Singgah. Berusahalah, mencoba dan memberikan berbagai model pembinaan (bimbingan perindividu, sosial kelompok, orangtu4 melalui guru kelas (guru BK) bagi anak jalanan yang masih sekolah, keagamaan dan rekreasi edukasi), terhadap

anak jalanan dalam setiap permasalahan yang belum mampu diselesaikan Rumah Singgah dengan baik.

4. Untuk meningkatkan Outcomes (Dampak), anak jalanan unhrk selalu siap mendukung berbagai progam bimbingan yang telah diterapkan Rumah Singgah. Aktif dalam mengikuti jadwal-jadwal pembinaan dan kegiatan, serta tidak egois dengan kepentingan sendiri. Siapa lagi yang peduli terhadap masa depan dan perkembangan biopsiknsosial anakjalanan, kalau tidak diawali dari kepedulian Rumah Singgah dan pihak-pihak yang benar-benar tulus membantu. Serap dan aplikasikan dari setiap pembinaan yang diberikan Rumah Singgah, terutama dalam hal pembinaan moralitas, seperti: bimbingan perindividu, bimbingan social kelompok, bimbingan orangtua, bagi anak jalanan yang masih sekolah, bimbingan keagamaan, rekreasi edukasi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang.
- Bagong, Suyanto, 2002, Pengarusutamaan Hak Anak di Daerah, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dan Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur.
- Bagong, Suyanto, 2002, Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya, Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, Surabaya
- Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya.
- Bridgman, J. & Davis G, 2000, Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW
- Danim, Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Pustaka Setia, Bandung.
- Drucker, P.F. 1989. The New Realities: In Government and Politics/In economics and Business/In Society and World View. New York: Harper & Row Publisher.
- Dunn, W. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Terjemahan Samodra Wibawa Dkk., Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dye, R. Thomas, 1978, Understanding Public Policy, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.

- H.A.R. Tilaar, 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Buku Kompas, Jakarta.
- H.A.R. Tilaar, 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT Asdi Mahatsya.
- Husein Kosasih, Drs. H., 2004, *Teknik Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama*, Modul Diklat
- AKIP/LAKIP, Jakarta: Bafan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi, Departemen Agama RI.
- Indonesia, LANRI, 2004, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Edisi Kedua, Jakarta: LAN.
- Islamy, Irfan M, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta
- Moleong. L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S, 2002, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nazir, Mochammad, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pal, Leslie A. 1987. *Pubic Policy Analysis an Introduction*. University of Calgary
- Purwanto, Drs, M.Pd., Atwi Suparman, Prof. Dr. M.Sc., 1999, *Evaluasi Program Diklat*, Jakarta: Setia LAN, Press.
- Ramesh B. 1990. *Micro satellites in plants: A new class of molecular markers*. *Curr. Sci.* 70:45-54
- Ripley, B. Randall. 1985. *Policy Analisys in Political Science*. Nelson-Hall Publishers. Chicago
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Slameto, Drs., 2001, *Evaluasi Pendidikan*, Cetakan ketiga, Jakarta: PT Bhumi Aksara

- Suharsimi, Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2005, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Suharso, Drs. Dan Ana Retnoningsih Dra, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama*, Semarang: Widya Karya.
- Tan, M.G. 1990. *Pelapisan Sosial: Siapa yang Mendapat Apa, Kapan, Bagaimana.* dalam Pardede, S. (ed) *70 tahun Dr. I.B Simatupang; Saya Orang yang Berhutang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Warella. Y, 2002, *Kebijakan Publik, hand Out MAP UNDIP*, Semarang.
- Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PEDOMAN WAWANCARA TAK BERSTRUKTUR

Tentang : Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang

Pimpinan Rumah Singgah & Pekerja Sosial Rumah Singgah SETARA

1. Tanggal berapa Rumah Singgah berdiri ?
2. Bagaimana Visi dan Misi dari Rumah Singgah
3. Berapa jumlah pengurus Rumah Singgah saat ini ?
4. Bagaimana penjelasan dari struktur organisasi Rumah Singgah ?
5. Bagaimana program jangka pendek dan jangka panjang dari Rumah Singgah
6. Berapa jumlah anak jalanan yang dibina di rumah singgah anda ?
(Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis kegiatan/pekerjaan)
7. Apakah program / kegiatan dirumah singgah anda mengacu pada standar layanan dari Dinas Sosial ?
8. Jika tidak kenapa ? sebutkan ! jika ya, dasarnya apa?
9. Program / layanan apa saja yang anda berikan untuk anak jalanan ?
10. Apa program unggulan yang ada pada rumah singgah anda?

Catatan :

Wawancara ini hanya merupakan pedoman yang akan dikembangkan sesuai kejadian dilapangan

PEDOMAN WAWANCARA BERSTRUKTUR

A. Input

A.1. Sumberdaya Pendukung

1. Peneliti : Assalamu alaikum.
Bu Hening, bisa minta waktu sebentar saja untuk mendapat informasi tentang anak jalanan yang dibina di rumah singgah Setara
Informan : Bisa, mas Arfan,
(Hening anak yang dibina Yayasan Setara Semarang Anak jalanan yang
Budiyawati) dibina dirumah singgah jumlahnya bervariasi, antara 100 – 251 anak dan sebagian besar adalah anak laki-laki.
2. Peneliti : Apakah mereka menetap ?
Informan : Semuanya tidak menetap dirumah singgah, mayoritas dari anak
(Hening jalanan tersebut sifatnya hanya mampir / singgah secara rutin atau
Budiyawati) berkala sesuai program dan mengikuti kehendak hati anak tersebut. Walaupun ada yang tinggal itupun tidak lebih dari 15 anak.
3. Peneliti : Apakah dalam pembinaan anak jalanan di perlukan sumber daya pendukung ?
Informan : Ya...jelas diperlukan mas Arfan...mereka butuh perlengkapan
(Hening administrasi, sarana belajar, sarana hiburan dan perlengkapan rumah
Budiyawati) tangga
4. Peneliti : Maaf..menurut tanggapan Bapak Mohammad Farid terhadap permasalahan tersebut bagaimana ?
Informan : Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah “anak-anak”, sama dengan
(Mohammad anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan
Farid) pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak dapat terus mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan sarana dan prasarana yang memadai
5. Peneliti : Menurut Bu Hening, Apakah sumber daya pendukung mencukupi ?
Informan : Sarana dan prasarana di rumah singgah Setara Semarang sangat
(Hening mencukupi, alokasi anggarannya cukup serta memadai
Budiyawati)
6. Peneliti : Boleh saya minta tolong mau lihat sumber daya pendukung?
Informan : Boleh mas Arfan, mari kami antarkan
(Mohammad
Farid)

6. Informan : (Mohammad Farid)
5. Perlengkapan administrasi
Rumah Singgah Setara Semarang memiliki satu ruangan administrasi. Anak jalanan tidak dapat masuk ke ruang administrasi tanpa ada kehadiran pengurus di dalam ruangan tersebut, yang disajikan dalam gambar berikut.
6. Perpustakaan
Perpustakaan Rumah Singgah Setara Semarang telah tersedia dengan ukuran ruangan kurang lebih 16M² (4x4) dengan fasilitas meja/kursi dan koleksi pustaka yang memadai. Pengelolaan perpustakaan Rumah Singgah Setara Semarang belum ditangani secara profesional sebagaimana layaknya sebuah sarana penunjang pendidikan seperti manajemen tidak jelas, katalog indek, pengarang maupun judul belum diolah, waktu layanan yang masuk terbatas pada jam kerja.
7. Sarana Pertemuan dan belajar
Sarana pertemuan dan belajar yang tersedia di Rumah Singgah Setara Semarang menempati ruang meeting meliputi meja besar, dua whiteboard dan satu komputer Sarana belajar ini masih dalam kondisi baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap anak binaan. Berkenaan fasilitas belajar sebagai penunjang kegiatan pelayanan masih banyak yang harus dibenahi. Antara lain: pada komputer suplai listrik tidak mencukupi, tidak ada pengelola khusus, kebersihan tidak terjaga, kursi yang tidak sesuai jumlah dan spesifikasinya.
8. Perlengkapan rumah tangga
Rumah Singgah Setara Semarang menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan oleh anak binaan dan pengurus berupa satu kompor, perlengkapan masak dan seperangkat alat makan. Perlengkapan mandi setiap anak binaan disediakan pula oleh pihak Rumah Singgah Setara Semarang. Ruang tidur anak binaan ada yang dilengkapi kasur namun ada pula anak binaan yang tidur dengan beralaskan karpet. Pada awalnya setiap kamar anak binaan dilengkapi dengan springbed, namun kasur tersebut sering dijadikan tempat bermain anak binaan yang menyebabkan rusaknya kasur tersebut. Setiap ruang tidur terdapat satu lemari. Setiap anak binaan dapat menggunakan lemari tersebut untuk menyimpan barang mereka
6. Peneliti :
Informan : (Mohammad Farid)
- Saya kira cukup dan terima kasih atas informasinya sama-sama mas Arfan

A.2. Sumber Daya Manusia

1. Peneliti : Assalamu alaikum war. Wab.Ibu Esmi, kami mohon waktu akan wawancara. Bisa Ibu?...
Informan : bisa silahkan !
(Esmi
Warassih)
2. Peneliti : Apakah ada sumber daya lain.. selain sumber daya pendukung...
Informan : Ada, mas Arfan..mereka para petugas pengelola rumah singgah meliputi antara lain Ketua rumah singgah, Anggota atau para pekerja sosial, ketua kelompok anak jalanan dan tenaga administrasi rumah singgah.
(Esmi
Warassih)
3. Peneliti : Bagaimana petugas pengelola rumah singgah dalam memberikan pelayanan
Informan : Pengurus rumah singgah Setara memberikan pelayanan social sebagai wujud komitmen serta kepedulian mereka untuk membantu anak-anak jalanan kearah terwujudnya kesadaran, kepedulian dan dukungan terhadap program penanganan permasalahan sosial anak jalanan di kawasan Kota Semarang. Dalam melakukan kegiatan pendampingan, latar belakang pendidikan para petugas Yayasan Setara Semarang rata-rata berbasis ilmu pekerjaan sosial. Keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap permasalahan sosial anak jalanan penanganannya akan memperoleh hasil yang optimal apabila dilakukan melalui pendekatan profesi pekerjaan sosial
(Esmi
Warassih)
4. Peneliti : Saya kira cukup dan terima kasih atas informasinya
Informan : sama-sama mas Arfan
(Esmi
Warassih)

B. Proses

B.1. Kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pembinaan anak jalan

1. Peneliti : Assalamu alaikum.
Maaf.. Bu Hening, mengganggu waktu ibu..bisa minta waktu sebentar saja untuk mendapat informasi tentang bagaimana menentukan program / layanan apa saja yang ibu berikan di rumah singgah untuk anak jalanan
Informan : Dalam menentukan program pembinaan, yang jelas disesuaikan dengan visi dan misi yang ada. Diantara program yang kami berikan (Hening : satu, pendidikan, pelatihan dan magang; dua, pemberdayaan Budiyawati) ekonomi orang tua; tiga, lingkungan hidup; empat, sistem rujukan (panti dan sekolah formal)
2. Peneliti : Bagaimana model dan kegiatan pembinaan moral anak jalanan di Rumah Singgah selama ini
Informan : Model dan kegiatan pembinaan moral anak jalanan di Rumah (Hening Singgah selama ini, tergabung dalam layanan *resosialisasi* dan Budiyawati) pendidikan, diantaranya; (1) kegiatan keagamaan (2) pengajaran dan diskusi tentang norma sosial; (3) bimbingan sosial (4) kunjungan ke rumah orang tua anak jalanan dalam rangka penyatuan kembali dengan keluarganya.
3. Peneliti : Dari penjelasan...Ibu.adakah metode khusus yang aplikatif dalam membenahi moralitas negatif anak jalanan selama ini.
Informan : Belum..ada.. (Hening Budiyawati)
4. Peneliti : Selanjutnya ..layanan.apa saja yang ada di rumah singgah saat ini
Informan : Begini..mas Arfan...layanan-layanan lain yang selama ini sudah (Hening dilakukan, antara lain; (1) penjangkauan dan pendampingan di Budiyawati) jalanan; (2) beasiswa dan registrasi; (3) bantuan makan dan kesehatan; (4) pemberdayaan untuk anak jalanan, dengan berbagai keterampilan dan *skill*.
5. Peneliti : Maaf..kalau lebih terperinci..seperti apa bu Hening
Informan : Di Rumah Singgah Setara ini Mas: pembinaan yang dilakukan untuk (Hening hal ini, antara lain: bimbingan perindividu, bimbingan sosial Budiyawati) kelompok, bimbingan orangtua, bimbingan melalui guru kelas (guru BK) bagi anak jalanan yang masih sekolah, bimbingan keagamaan dan rekreasi edukasi
6. Peneliti : Saya kira cukup dan terima kasih atas informasinya.Bu Hening...maaf.saya akan bertanya pada eko
Informan : Silakan tentang apa..mas Arfan (Eko)

7. Peneliti : Begini mas eko..bagaimana..model pembinaan yang mas eko ikuti di rumah singgah Setara
 Informan : Kayak tadi Mas: paling kalau ada acara-acara penting seperti (Eko) bimbingan kesehatan, pengarahan dari kepolisian, keterampilan dan acara-acara keagamaan dari pengurus atau yang lain, kita dipanggil kesana (rumah singgah Setara) dan ikut, atau kita pulang ke Rumah Singgah kalau ada perlu aja. Seperti: minta bantuan berobat atau yang kita perlukan saat itu.
 c) Bimbingan dari Dinas Kesehatan Mas: seperti kita diberi pengarahan tentang berbagai bahaya penyakit akibat dari melakukan pergaulan bebas, ngepil, dan cara-cara hidup sehat.
 d) Kalo dari pihak Kepolisian: lebih memberikan pengarahan terhadap kita tentang cara untuk patuh hukum, tidak mencuri, mengganggu ketenangan umum dan lain sebagainya. Atau tentang sanksi hukum yang diberikan bila kita tidak lagi bisa taat hukum.
8. Peneliti : Saya kira cukup dan terima kasih atas informasinya
 Informan : sama-sama mas Arfan (Eko)

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap tentang model pembinaan anak jalanan ini, peneliti juga mencantumkan penjelasan dari Ibu Reni (Tetangga dekat Rumah Singgah Setara, selaku Ibu Ketua RT), sebagai berikut:

1. Peneliti : Assalamu alaikum.
 Maaf.. Bu Reni, mengganggu waktu ibu..bisa minta waktu sebentar saja untuk mendapat informasi tentang bagaimana Model pembinaan moral anak jalanan di Rumah Singgah Setara
 Informan : Begini mas Arfan..kadang saya dimintai tolong oleh pengurus untuk (Reni) mengisi pembinaan..mereka juga seperti anak saya mas.saya selaku Ibu Ketua PKK.mengisi tentang norma dan nilai-nilai yang baik di masyarakat, orangtua tentang pentingnya pendidikan dan dukungan untuk kebaikan moral anak.
2. Peneliti : Saya kira cukup dan terima kasih atas informasinya
 Informan : sama-sama mas Arfan (Reni)

Untuk memperoleh data tentang program yang diberikan tepat pada sasaran maka pimpinan rumah singgah Setara menjelaskan pembagian kelompok sasaran program pembinaan anak jalanan adalah :

1. Peneliti : Bagaimana pembagian kelompok sasaran program pembinaan anak jalanan
 Informan : Program yang ada di rumah singgah Setara ini kami bagi menjadi dua yaitu (Esmi Warassih)
 1. Kelompok rentan < 18 tahun
 2. Kelompok rawan > 18 tahun
2. Peneliti : Apakah dalam pembinaan anak jalanan diperlukan ruangan khusus
 Informan : Tentu..mas (Esmi Warassih)
 Sebagai implementasi program yang sekaligus menjadi program unggulannya, rumah singgah ini berinisiatif untuk memberikan ruang bagi anak dalam mendapatkan hak-haknya, terutama dalam mendapatkan pendidikan yang partisipatif dan kreatif. Ruang ini ditata dimana anak mendapatkan stimulasi untuk bereksplorasi ide dan kreasi.
 Ide dasarnya adalah the best interest of child, ruang anak ini disediakan untuk kenyamanan, kedamaian anak dalam bermain, belajar dan berdoa
 Konsep pendidikan untuk anak yang diselenggarakan dikomunitasnya. Setara menyediakan tempat dan konselor bagi anak-anak yang mengadu tentang masalah-masalah yang dihadapi baik disekolah, keluarga atau dalam interaksi dilingkungannya. Setara juga mengajak anak memahami nilai-nilai moralitas, hak-hak dasar dan kewajiban anak, serta patriotisme dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan religi. Didampingi para relawan, proses penggiatan Setara dirangsang untuk partisipatif, beragam, semarak, beretos dan sinambung

Program dukungan

1. Peneliti : Selain program utama tentunya ada program dukungan..bentuk seperti apa
 Informan : Program kesehatan bagi anak jalanan secara keseluruhan dalam (Yuli BDN) rangka mencegah dan menanggulangi penyakit virus HfV / AIDS baik bantuan secara medis maupun penyuluhan / ceramah. Ini berlaku bagi anak jalanan itu sendiri, juga keluarganya. Kami akan membina anak jalanan saat anak berusia dibawa 15 tahun, ini akan mempermudah kami dalam pembinaan. Jika sudah besar itu akan mendatangkan kesulitan bagi kami
2. Peneliti : Upaya merealisasikan program pembinaan diperlukan pendekatan pendekatan tertentu..seperti apa
 Informan : Saat melakukan sosialisasi program diperlukan adanya kesepakatan (Yuli BDN) antara anak asuh, orang tua dan pekerja sosial. Komitmen ini dibangun demi kelancaran program dan tujuan pengentasan masalah anak jalanan dapat segera terwujud. Dalam hal ini orang tua diharapkan dapat membantu dan memberi motivasi kepada anaknya supaya rajin mengikuti program pembinaan. Karena jika hal ini tidak dilakukan banyak sekali kendala yang akan ditemui oleh para pekerja sosial. Karena tidak jarang orang tua anak jalanan malah menyuruh dan menuntut anaknya agar setiap hari dapat membantu mengatasi ekonomi keluarga
3. Peneliti : Bagaimana program pembinaan saat ini menghadapi jumlah anak jalanan semakin meningkat.
 Informan : Sebagai dampak nyata dari kejadian yang ada yakni jumlah anak (Novi) jalanan semakin meningkat. Maka program yang dapat memberikan solusi adalah dengan cukup menggunakan kata kunci yakni pemberdayaan bagi anak jalanan sekaligus orang tuanya dan masyarakat sekitar sebagai faktor pendukung yang melingkupi kehidupan dimana anak jalanan berada. Upaya pemberdayaan diperuntukkan bagi anak jalanan yang dibina
3. Peneliti : Selanjutnya ?
 Informan : faktor utama yang diperlukan adalah "keinginan untuk sekolah". (Novi) " Kami menganggap nilai - nilai universal, nilai-nilai ideologi tentang tauhid perlu dan wajib ditanamkan pada anak jalanan karena mayoritas anak jalanan yang ada adalah orang muslim atau beragama Islam. Dan pendekatan yang dikembangkan dirumah singgah ini adalah tidak hanya menggunakan garis ekonomi, pendidikan, kesehatan saja akan tetapi ada yang lebih utama disini yakni membangun nilai-nilai agama. Jadi rumah singgah ini ingin menampakkan sebagai LSM yang bernuansa religius

Anak jalanan

1. Peneliti : apa yang menjadi kebutuhanmu
Informan : ya butuh uang..". Harapan mu apa jika ingin mendapatkan uang (Dana) "pingin kerja enak

B.2. Efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah Setara Semarang

Anak jalanan

1. Peneliti : apa kamu mengkomsumsi rokok
Informan : ya
(Yudha)
2. Peneliti : Terus ..selain itu apa
Informan : Hampir semua anak jalanan pasti mengkonsumsi rokok, dan pernah merasakan minum, ngelem dan ngepil
(Yudha)
3. Peneliti : Bagaimana masalah keuangan kamu
Informan : Saya..jika mempunyai uang hari ini sedikit ataupun besar jumlahnya tetap akan dihabiskan dalam sesaat / hari ini pula. untuk keesokan hari.. pasti ada uang ditangan " selanjutnya dihabiskan pula dalam tempo sesaat, dan begitu pula seterusnya.
4. Peneliti : Apakah kamu menabung
Informan : Menabung.....apalagi memikirkan tentang, Esok masih ada hari yang perlu difikirkan untuk melangkah kedepan
(Yudha)
5. Peneliti : Apakah faktor penyebab kamu turun ke jalan
Informan : Awalnya aku punya masalah dengan saudara akhirnya aku memutuskan diri untuk minggat akhirnya sampai ke terminal Terboyo. Karena tidak punya uang untuk makan akhirnya aku diajak ngamen oleh teman yang baru aku kenal di terminal Terboyo. Dan selanjutnya ada perasaan ingin pulang tapi sesampai dirumah malah bapak sudah tidak bekerja lagi sebagai sopir truk dan malah menuntut aku untuk membantu membayar rekening rumah. Akhirnya aku sering cek-cok sama bapak dan mulai saat itu pun aku sudah jarang pulang dan memutuskan diri ngamen. Sebetulnya cek-cok dengan bapak sering terjadi karena berangkat dari kebutuhan keluarga yang semakin banyak dan tak dapat terpenuhi
(Nardi)
6. Peneliti : apa nggak bosan hidup dijalan terus, dan apa akan selamanya hidup dijalan ?
Informan : Ah ya nggak lah, sebetulnya aku sudah capek dijalan. Aku dijalan sudah sekitar 6 -7 tahun, tapi bagaimana aku akan kerja aku tidak punya keahlian hanya nyanyi, dan sekolah ku hanya sampai tamat SMP. Sebetulnya sih enak ngamen sebentar nyanyi sudah dapat sekitar Rp 80.000 - Rp 115.000
(Nardi)

C. Hasil

C.1. Peran rumah singgah Setara dalam mendukung kebijakan pendampingan anak jalanan di Kota Semarang.

1. Peneliti : Apa kebutuhan dan harapan dari anak jalanan dalam menentukan program kunci pembinaan
 Informan : Dengan menyiapkan mental yakni persiapan peralihan profesi dari ngamen ke arah manusia yang mempunyai skill. Maksudnya bahwa (Esmi saat pekerjaannya adalah pengamen tanpa mempunyai keahlian pun Warassih) bisa mendapatkan uang dengan mudah, namun jika beralih profesi yang menuntut keahlian maka diperlukan persiapan diri belajar' berlatih dan kerja keras agar mempunyai ketrampilan. Semua ini berproses perlu waktu untuk memandirikan mereka berangkat dari latar belakang dia sebagai anak jalanan yang sarat dengan pengaruh yang cukup kuat dan juga dari sifat malas diharapkan punya semangat untuk merubah diri ke manusia yang punya potensi. Sehingga diperlukan solusi yang menyeluruh dan terangkai tidak bisa terputus.
2. Peneliti : Bagaimana mengatur manajemen atau pengelolaan rumah singgah tersebut
 Informan : Di rumah singgah kami manajemen yang kami gunakan adalah (Esmi manajemen terbuka dan bersifat partisipatif. Open manajemen ini Warassih) maksudnya semua tahu semua, dari unsur perencanaan yang terbuka saat kita merancang sebuah program biasanya adalah dalam forum rapat kerja. Dan pengorganisasian adalah prinsip yang harus kami terapkan karena dengan pengorganisasian semua orang tahu tugasnya masing-masing. Pengendalian jelas kami butuhkan disini karena menjaga organisasi kami agar tetap pada jalurnya untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan organisasi kami. Evaluasi yang kami lakukan adalah evaluasi program dan evaluasi pendampingan, dan ini sifatnya rutinitas. Bersifat partisipatif disini semua unsur yang ada pada organisasi kami diharapkan dapat bersifat partisipatif
3. Peneliti : Selain itu ?
 Informan : Baik mulai dari jajaran kepengurusan paling atas sampai paling (Esmi bawah termasuk sasaran binaan yakni anak jalanan. Sasaran binaan Warassih) ini unsur partisipatifnya saat penentuan sebuah program berangkat dari kebutuhannya dan saat mengevaluasi sebuah program untuk mengetahui sampai dimana program layanan yang kami berikan sudah tepat sasaran apa belum. Hal ini kami butuhkan karena keberhasilan program yang ada jelas berangkat dari unsur partisipasinya dari semua pihak termasuk anak jalanan sebagai sasaran binaan

C2. Bentuk-bentuk pendampingan anak jalanan yang dilakukan oleh rumah singgah Setara Semarang

1. Peneliti : Bagaimana tahapan pelayanan rumah singgah Setara dalam menangani anak jalanan
 Informan : Tahap Penjangkauan
 (Esmi Tahap Identifikasi dan Pengungkapan Masalah (Problem
 Warassih) Assesment).
 Tahap Resosialisasi
 Tahap Pemberdayaan
 Tahap Pengakhiran Pelayanan (Terminasi).
2. Peneliti : Teknik apa dalam menangani anak jalanan
 Informan : Penciptaan suasana kekeluargaan bertujuan agar anak jalanan dapat
 (Esmi kembali menemukan konsep keluarga dimana untuk sebagian besar
 Warassih) diantaranya tidak lagi dapat dipenuhi

D. Dampak

1. Peneliti : Bagaimana dampak dalam menangani anak jalanan apakah sudah optimal
 Informan : belum optimal
 (Esmi karena tingkat kemampuan ataupun kapabilitas para petugas rumah
 Warassih) singgah dalam memahami prosedur pelayanan maupun pemahaman profesi pekerjaan sosial hingga membawa dampak pada pencapaian kinerja pelayanan. Hal ini tampak dari berbagai kendala yang dihadapi para petugas dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pelayanan dirumah singgah,